



# IKHTISAR LAPORAN HASIL PENGAWASAN

SEMESTER I TAHUN 2023

## INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH

Jalan Pemuda No.127 - 133, Sekayu  
Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang  
Jawa Tengah 50132



(024) 3517283-3517284-3556230



@INSPEKTORAT\_JTG



@INSPEKTORAT\_JTG



INSPEKTORAT@JATENGPROV.GO.ID



@INSPEKTORAT PROV JATENG



@INSPEKTORAT\_JTG

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah menyelesaikan penyusunan dokumen Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Semester I Tahun 2023. Ikhtisar ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah serta sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban hasil kegiatan pengawasan kepada Gubernur selaku Pimpinan Daerah Provinsi, sebagaimana tertuang dalam piagam audit intern APIP Provinsi Jawa Tengah tanggal 6 Juni 2017.

Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP Semester I Tahun 2023 ini berisi kegiatan-kegiatan pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah pada Semester I Tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya. Ikhtisar ini disusun dengan harapan:

- a. Memberikan informasi perkembangan seluruh hasil pengawasan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan
- b. Memberikan informasi kegiatan pengawasan dan sebagai referensi dalam upaya perbaikan kinerja pengawasan di masa mendatang dalam rangka mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Demikian Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Semester I Tahun 2023 ini disusun, semoga bermanfaat.

Semarang, 9 Agustus 2023

Inspektur  
Provinsi Jawa Tengah



**DHONI WIDIANTO, S.Sos., M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19731015 199703 1 002



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I INFORMASI UMUM</b> .....	<b>1</b>
A. Dasar Hukum .....	1
B. Struktur Organisasi .....	2
C. Kebijakan Strategis .....	3
D. Tujuan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP .....	7
E. Kegiatan Pengawasan dan Realisasinya .....	8
F. Kode Etik AAIP .....	10
<b>BAB II HASIL PENGAWASAN</b> .....	<b>12</b>
A. Audit/Pengawasan .....	12
B. Reviu.....	17
C. Pemantauan.....	22
D. Evaluasi.....	22
E. Pengawasan Lainnya.....	24
<b>BAB III HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT</b> .....	<b>33</b>
A. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI.....	33
B. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP .....	34
<b>BAB IV HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT</b> .....	<b>37</b>
A. Dilakukan Pemeriksaan Sendiri oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.....	38
B. Dilimpahkan Penanganannya kepada Kabupaten/Kota.....	38
<b>BAB V SIMPULAN, HAMBATAN DAN REKOMENDASI</b> .....	<b>40</b>
A. Simpulan .....	40
B. Hambatan .....	41
C. Rekomendasi.....	41
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>42</b>
Lampiran 1 Status Temuan Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjutnya Hasil Pemeriksaan BPK-RI Tahun 2008 s.d. 2023 .....	42
Lampiran 2 Status Temuan Hasil Pemeriksaan/Audit dan Tindak Lanjutnya Hasil Pemeriksaan/Audit Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 s.d. 2023 .....	56
Lampiran 3 Status Temuan Hasil Pemeriksaan/Audit dan Tindak Lanjutnya Hasil Pemeriksaan/Audit Itjen Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011 s.d. 2022 .....	61
Lampiran 4 Rekapitulasi Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat Tahun 2023 .....	64

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Aset Inspektorat Provinsi Jawa Tengah .....	7
Tabel 1.2 Data Program Rencana Kerja dan Realisasi Berdasarkan PKPT Tahun 2023 ....	10
Tabel 2.1 Temuan Hasil Audit/Pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 .....	12
Tabel 2.2 Rekomendasi Hasil Audit/Pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 .....	14
Tabel 2.3 Realisasi Audit Kinerja Semester I Tahun 2023 .....	15
Tabel 2.4 Target dan Realisasi ADTT Semester I Tahun 2023 .....	16
Tabel 2.5 Perolehan Opini BPK atas LKPD Provinsi Jawa Tengah .....	18
Tabel 2.6 Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.....	19
Tabel 2.7 Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP di OPD Provinsi Jawa Tengah .....	22
Tabel 2.8 Rincian Pelaporan Gratifikasi Provinsi Jawa Tengah Semester I Tahun 2023 ...	25
Tabel 2.9 Rekapitulasi Penanganan LHKPN.....	26
Tabel 2.10 Rekapitulasi Penanganan LHKASN.....	26
Tabel 2.11 Perbandingan Capaian MCP KORSUPGAH Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020, 2021, dan 2022 .....	28
Tabel 2.12 Daftar OPD yang Memperoleh Predikat WBK .....	28
Tabel 2.13 Daftar OPD yang Memperoleh Predikat WBBM.....	29
Tabel 2.14 Daftar OPD Lulus Seleksi Administrasi dengan Catatan .....	30
Tabel 2.15 Hasil Telaah Sejawat Inspektorat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta .....	31
Tabel 2.16 Elemen Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Jawa Tengah .....	31
Tabel 3.1 Status Tindak Lanjut BPK RI Tahun 2005 s.d. 2023 .....	33
Tabel 3.2 Status Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan SIMWAS Online (Jumlah Temuan).....	35
Tabel 3.3 Status Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan SIMWAS Online (Jumlah Nilai).....	35
Tabel 3.4 Status Tindak Lanjut Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023 .....	36
Tabel 4.1 Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Sumber Aduan yang Masuk Pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.....	37
Tabel 4.2 Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Penanganannya Pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah .....	38
Tabel 4.3 Pengaduan Masyarakat Tahun 2023 Berdasarkan Klasifikasi Jenis Aduan .....	38
Tabel 4.4 Pengaduan Masyarakat yang dilimpahkan pada Kabupaten Kota.....	39



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan/Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2022 .....	3
Gambar 1.2	Sumber Daya Aparatur/Kepegawaian Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 .....	6
Gambar 2.1	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Setiap Tahun .....	20
Gambar 2.2	Penerimaan Penghargaan Predikat A atas Indeks Reformasi Birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.....	20



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 2. 1 Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Setiap Tahun.....	20
Grafik 2. 2 Grafik Nilai SAKIP Provinsi Jawa Tengah dari Tahun 2018 s.d. 2022.....	23
Grafik 2. 3 Nilai rata-rata 49 OPD Provinsi Jawa Tengah Hasil dari Penjaminan Kualitas SPIP Terintegrasi.....	32



## **BAB I INFORMASI UMUM**

### **A. Dasar Hukum**

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.



## B. Struktur Organisasi

Kedudukan, tugas, fungsi dan struktur organisasi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah diatur dengan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 antara lain sebagai berikut:

### 1. Kedudukan

Inspektorat merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

### 2. Tugas dan Fungsi

Tugas pokok Inspektorat Provinsi Jawa Tengah adalah membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

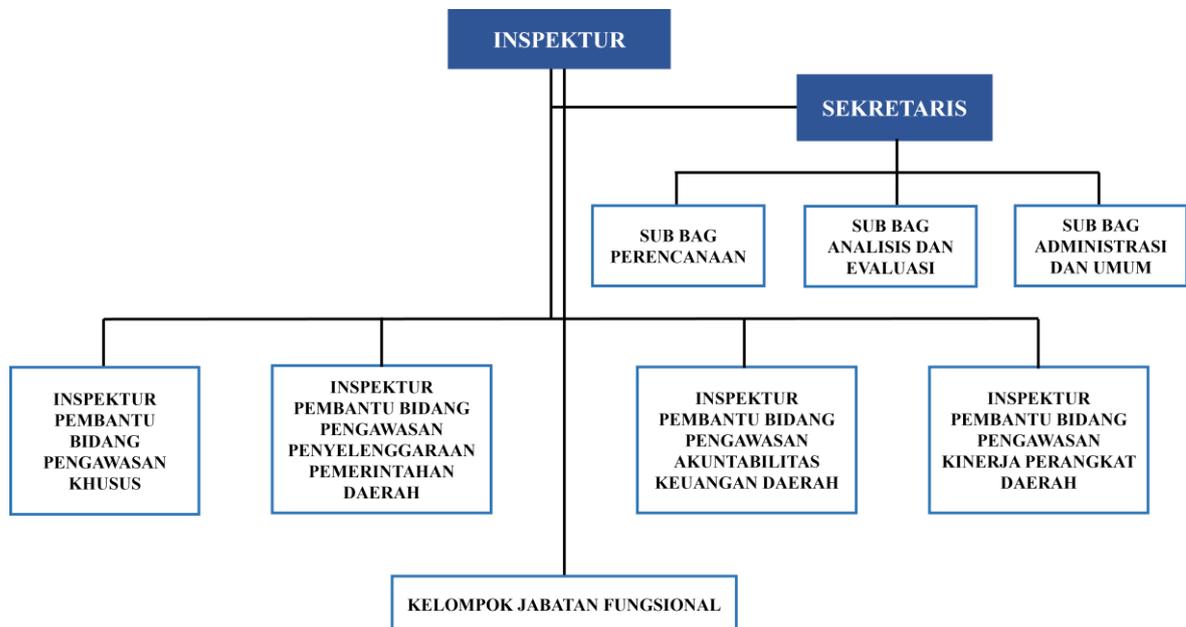
Inspektorat melaksanakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
- i. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

### 3. Struktur organisasi dan nama pejabat di lingkungan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah adalah:

- |                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| a. Inspektur                    | : Dhoni Widiyanto, S.Sos., M.Si. |
| b. Plt. Sekretaris              | : Bagus Panuntun, S.STP., M.A.   |
| 1) Sub Bagian Administrasi Umum | : Sri Rahayuningsih, S.E., MM.   |
| 2) Sub Bagian Perencanaan       | : Sodikun, S.E., M.SE., M.A.     |

- 3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan : Bagus Panuntun, S.STP., M.A.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I : Drs. Antonius Trihananto
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II : Soemarijono, S.E., M.Si.
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III : Ratna Luhung T., S.E., MM.
- f. Plt. Inspektur Pembantu Khusus : A. Dwijo Putranto, S.E., Akt, M.Si.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari :
  - 1) Auditor;
  - 2) Auditor Kepegawaian; dan
  - 3) Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD).



Gambar 1.1 Bagan/Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2022

### C. Kebijakan Strategis

#### 1. Eksternal

Visi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari” dengan *tagline* “Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”. Misi kedua yaitu: “Memperluas reformasi birokrasi melalui penguatan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota” merupakan komitmen Gubernur Jawa Tengah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) yang bebas dari korupsi. Kondisi tersebut sejalan dengan amanat



Presiden dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Sejalan dengan tujuan Gubernur Jawa Tengah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 untuk menciptakan sistem birokrasi yang transparan dan akuntabel, sasaran yang ingin dicapai yaitu terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka Inspektorat Provinsi Jawa Tengah ikut berperan aktif dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai tersebut. Hal ini tercermin dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

## 2. Internal

Tujuan yang ingin dicapai Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Renstra 2018-2023 yaitu:

- a. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik di Jawa Tengah;
- b. Meningkatkan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah daerah yang profesional dan kompeten.

Dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut dibutuhkan beberapa strategi yang harus dilakukan. Adapun strategi yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yaitu:

- a. Peningkatan sistem tata kerja birokrasi yang transparan dan akuntabel;
- b. Pengembangan sistem pelayanan publik yang transparan berbasis teknologi informasi;
- c. Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di Provinsi dan seluruh Kabupaten/Kota;
- d. Pengintegrasian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di seluruh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- e. Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran;
- f. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran;
- g. Peningkatan kualitas SDM aparatur pengawasan..



Arah kebijakan pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, yaitu:

- a. Menjadi mitra Perangkat Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka asistensi, konsultasi, dan reviu;
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pengawasan;
- c. Meningkatkan sarana penanganan pengaduan masyarakat berbasis pada teknologi informasi;
- d. Meningkatkan keefektifan sistem pengawasan di Perangkat Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- e. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pengawasan.

Sebagai gambaran mengenai keberhasilan penguatan di bidang pengawasan, maka Inspektorat Provinsi Jawa Tengah memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) seperti yang tertera dalam Renstra Perubahan Tahun 2018-2023, yaitu:

- a. Level Kapabilitas APIP dengan indikator sasaran adalah Kapabilitas APIP Level 3 penuh pada elemen:
  - Peran dan Layanan (elemen 1);
  - Praktik Profesional (elemen 3); dan
  - Struktur Tata Kelola (elemen 6).
- b. Nilai Maturitas SPIP dengan indikator sasaran adalah Maturitas SPIP Nilai 3,19.

Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana target yang tertuang dalam RPJMD perlu didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut.

- a. Sumber Daya Aparatur/Kepegawaian

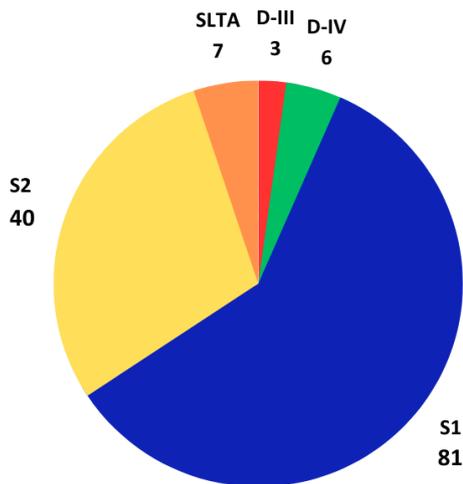
Inspektorat Provinsi Jawa Tengah memiliki 137 sumber daya aparatur. Berdasarkan jumlah tersebut, tidak ada ASN di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dengan golongan/pangkat I, golongan/pangkat II/c dan II/d, serta golongan/pangkat IV/c dan IV/d. Golongan/pangkat ASN didominasi oleh golongan/pangkat III dengan tingkat pendidikan mayoritas adalah Sarjana S1/D-IV. Selengkapnya data ASN Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar 1.2.

## PROFIL KEPEGAWAIAN INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH



**137 SUMBER DAYA  
APARATUR**

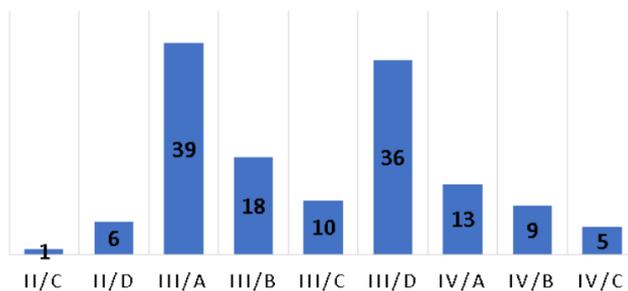
### Berdasarkan Pendidikan



### Berdasarkan Jabatan

Eselon II	1
Eselon III	3
Eselon IV	3
Auditor	46
PPUPD	20
Audiwan	2
Sekretariat	64

### Berdasarkan Golongan



### Berdasarkan Sertifikasi

PBJ	28
CFrA	16
CA	1
CRA	12
QRMA	10
QRMP	12
CGAA	1

Gambar 1.2 Sumber Daya Aparatur/Kepegawaian Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

b. Sarana dan Prasarana

Guna mendukung tugas dan fungsi pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah memiliki sarana dan prasarana yang dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Data Aset Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

No.	NAMA ASET/BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp)
<b>1</b>	<b>Tanah</b>	-	-
<b>2</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>1.539</b>	<b>13.273.433.774</b>
	- Alat-Alat Besar	7	208.302.000
	- Alat-Alat Angkutan	34	4.782.892.291
	- Alat-Alat Bengkel dan alat ukur	24	71.400.000
	- Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.042	4.818.685.900
	- Alat-Alat Studio Komunikasi dan Pemancar	64	940.908.165
	- Alat-Alat Laboratorium	14	122.022.000
	- Alat Persenjataan	1	8.500.000
	- Alat Komputer	360	2.425.548.418
<b>3</b>	<b>Gedung dan Bangunan (Bangunan Gedung/Kantor)</b>	<b>4</b>	<b>13.139.885.450</b>
	- Bangunan Gedung	3	13.125.575.450
	- Tugu titik kontrol/pasti	1	14.310.000
<b>4</b>	<b>Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	-	-
<b>5</b>	<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>210</b>	<b>23.412.900</b>
	- Bahan Perpustakaan	209	21.412.900
	- Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan	1	2.000.000
<b>6</b>	<b>Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>1.753</b>	<b>26.541.557.124</b>

#### D. Tujuan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP

Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menyatakan bahwa setelah melaksanakan tugas pengawasan, APIP wajib membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada pimpinan instansi pemerintah yang diawasi. Selain itu APIP wajib menyusun dan menyampaikan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan.

Adapun tujuan disusunnya Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP Semester I Tahun 2023 ini sebagai berikut:

1. Mengetahui jumlah hasil pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah secara periodik berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2023;
2. Tersedianya informasi hasil pengawasan APIP secara berkala;
3. Mengetahui perkembangan tindak lanjut hasil pengawasan APIP;



4. Tersedianya informasi hasil penanganan pengaduan masyarakat; dan
5. Mengetahui masalah dan hambatan dalam penyelenggaraan pengawasan intern pemerintah.

#### **E. Kegiatan Pengawasan dan Realisasinya**

Kegiatan pengawasan pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, meliputi kegiatan pengawasan berdasarkan PKPT maupun Non PKPT. Kegiatan pengawasan tersebut antara lain meliputi:

1. Audit Kinerja, pada:
  - a. Perangkat Daerah;
  - b. SMA/SMK/SLB Negeri;
  - c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
  - d. Pengawasan Umum Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  - e. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan
  - f. Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah Kabupaten/Kota.
2. Audit dengan Tujuan Tertentu, pada:
  - a. Kasus/Aduan Masyarakat/Investigasi;
  - b. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota;
  - c. Wajib Laport LHKPN;
  - d. Bantuan Keuangan Pemerintah Desa;
  - e. Pelayanan Publik UPTD Provinsi Jawa Tengah;
  - f. Audit Gender;
  - g. Sistem IT UKPBJ;
  - h. Probitas Audit;
  - i. Kepatuhan UKPBJ;
  - j. Pengelolaan SDM;
  - k. Proses Perizinan dan Non Perizinan;
  - l. Bantuan Sosial;
  - m. Optimalisasi Aset; dan
  - n. Belanja Hibah



3. Reviu, pada:
  - a. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
  - b. Dokumen Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD);
  - c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
  - d. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
  - e. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
  - f. Standar Satuan Harga (SSH);
  - g. Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi;
  - h. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
  - i. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
  - j. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan
  - k. Analisis Standar Biaya (ASB) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Provinsi Jawa Tengah.
4. Evaluasi, pada :
  - a. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD);
  - b. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (SAKIP) Perangkat Daerah; dan
  - c. Benturan Kepentingan.
5. Pemantauan pada limpahan Kasus Aduan Masyarakat ke Kabupaten/Kota;
6. Pengawasan lainnya yang terdiri dari:
  - a. Fasilitasi, Pendampingan Pengisian, dan Verifikasi LHKPN dan LHKASN 2022 serta Persiapan LHKPN 2023 (Pengumpulan Data Wajib Laport);
  - b. Sosialisasi Pembangunan Budaya Integritas;
  - c. Sosialisasi Saber Pungli;
  - d. Monitoring MCP Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (KORSUPGAH);
  - e. Konsultasi capaian MCP Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
  - f. Monitoring Capaian Stranas PK;
  - g. Reviu Rencana Tindak Pengendalian Manajemen Risiko;
  - h. Pendampingan dan Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi;
  - i. Asistensi Pembangunan Zona Integritas;
  - j. Fasilitasi RKPD Kabupaten/Kota;

- k. Koordinasi Kapabilitas APIP; dan
- l. Pengawasan Capaian SPM.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023, rencana kegiatan PKPT tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Data Program Rencana Kerja dan Realisasi Pengawasan Berdasarkan PKPT Semester I Tahun 2023

No.	KEGIATAN	PKPT			
		Target		Realisasi	
		Jumlah OP	Jumlah Dana (Rp.)	Jumlah OP	Jumlah Dana (Rp.)
<b>A</b>	<b>Audit</b>	<b>117</b>	<b>2.268.540.000,00</b>	<b>117</b>	<b>2.752.639.077,00</b>
	- Audit Dengan Tujuan Tertentu	34	1.208.570.000,00	37	764.304.810,00
	- Audit Kinerja	28	988.930.000,00	32	1.376.097.154,00
	- Reviu	56	313.290.000,00	84	612.237.113,00
<b>B</b>	<b>Evaluasi</b>	<b>42</b>	<b>157.520.000,00</b>	<b>14</b>	<b>122.470.000,00</b>
<b>C</b>	<b>Pemantauan</b>	<b>6</b>	<b>35.520.000,00</b>	<b>9</b>	<b>42.712.000,00</b>
<b>D</b>	<b>Pengawasan Lainnya</b>	<b>144</b>	<b>897.700.000,00</b>	<b>179</b>	<b>850.402.698,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>309</b>	<b>3.601.530.000,00</b>	<b>319</b>	<b>3.768.223.775,00</b>

#### F. Kode Etik AAPI

Pembinaan, pengembangan dan pembangunan profesi auditor intern pemerintah dilaksanakan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di segala bidang. Perlu adanya upaya peningkatan profesionalisme auditor secara berkesinambungan guna mewujudkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang efektif sebagaimana dimaksud pada pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yaitu:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.



Bahwa dalam rangka pembinaan, pengembangan dan pembangunan profesi auditor intern pemerintah tersebut perlu wadah yang mewakili profesi auditor intern pemerintah secara keseluruhan, menetapkan standar kualitas, mengembangkan dan menegakkan kode etik, memelihara martabat, kehormatan, moral dan integritas yang tinggi, mengembangkan dan melaksanakan telaah sejawat untuk menciptakan kepercayaan atas hasil kerja auditor intern pemerintah, dan menyediakan wadah untuk komunikasi, konsultasi, koordinasi, serta usaha-usaha bersama lain yang diperlukan.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah instansi pemerintah yang berhak untuk mengemban tugas pengawasan intern yang meliputi: audit, reviu, evaluasi, monitoring, konsultasi, assistensi dan kegiatan pengawasan lainnya. Dalam rangka memberikan nilai tambah bagi efektivitas dan efisiensi organisasi, adanya implementasi Kode Etik bagi auditor yang merupakan subyek dari pengawasan, dipastikan akan membantu organisasi/instansi dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good goverment*) yang menjadi bagian dari tugas nasional.

Dalam penerapan kode etik, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah berpedoman secara khusus pada Kode Etik AAPI yang merupakan aturan perilaku dan etika yang harus dipatuhi oleh setiap mereka yang menjalankan tugas profesi auditor Intern Pemerintah dan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai pedoman umum ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dalam pelaksanaannya, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah menerapkan kode etik di lingkungan APIP dengan melakukan sosialisasi pada seluruh auditor dan aktif melakukan pemantauan terhadap penerapan kode etik untuk memastikan bahwa kode etik telah ditegakkan sehingga menciptakan kepercayaan atas hasil kerja APIP.

## BAB II HASIL PENGAWASAN

Berdasarkan tugas pokok Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota tahun 2023, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan Program Kerja Pengawasan baik berdasarkan PKPT maupun Non PKPT.

Pada tahun 2023 Inspektorat Provinsi Jawa Tengah melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah termasuk pemeriksaan kasus dan khusus, evaluasi dan pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya.

### A. Audit/Pengawasan

#### 1. Audit Kinerja

Audit kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, serta ketaatan pada peraturan. Dalam melaksanakan audit/pengawasan, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah mengacu pada PKPT yang ditetapkan. PKPT tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

Pada Semester 1 Tahun 2023 terdapat 52 LHP dengan 328 temuan 407 rekomendasi dengan nilai Rp. 886.422.651,84 dengan rincian temuan sesuai tabel 2.1.

Tabel 2.1 Temuan Hasil Audit/Pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

No	Kelompok / Sub / Jenis Temuan	Kode	Temuan Hasil Pemeriksaan		
			Jumlah Temuan	%	Nilai (Rp.)
1	2	3	4	5	6
	<b>Temuan Ketidapatuhan Terhadap Peraturan</b>	<b>01</b>			
1	Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah	01.01	52	42,62%	886.422.651,84
2	Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang	01.02	2	1,64% %	0



No	Kelompok / Sub / Jenis Temuan	Kode	Temuan Hasil Pemeriksaan		
			Jumlah Temuan	%	Nilai (Rp.)
	terjadi pada perusahaan milik negara				
3	Kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah	01.03	4	3,28%	0
4	Administrasi	01.04	64	52,46%	0
5	Indikasi tindak pidana	01.05	0	0,0%	0
<i>Subtotal Kejadian</i>			<b>122</b>	<b>37,20%</b>	886.422.651,84
	<b>Temuan kelemahan sistem pengendalian intern</b>	<b>02</b>			
1	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	02.01	39	25,16%	0
2	Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	02.02	16	10,32%	0
3	Kelemahan struktur pengendalian intern	02.03	100	64,52%	0
<i>Subtotal Kejadian</i>			<b>155</b>	<b>47,25%</b>	<b>0</b>
	<b>Temuan 3E</b>	<b>03</b>			
1	Ketidakhematan/pemborosan/keti dakekonomisan	03.01	2	3,92%	0
2	Ketidakefisienan	03.02	3	5,88%	0
3	Ketidakefektifan	03.03	46	90,2%	0
<i>Subtotal Kejadian</i>			<b>51</b>	<b>15,55%</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>			<b>328</b>	<b>100%</b>	<b>886.422.651,84</b>

Tabel di atas menunjukkan kelemahan yang sering terjadi pada Perangkat Daerah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan total temuan dapat dilihat bahwa temuan terkait kelemahan sistem pengendalian intern sebesar 47,25%, ketidakpatuhan terhadap peraturan sebesar 37,20% dan temuan 3E (Ekonomis, Efektif, dan Efisien) sebesar 15,55%.

Persentase temuan terbanyak terkait kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan, sehingga fungsi pembinaan pengendalian internal dan penekanan terhadap peraturan menjadi hal penting yang perlu diperhatikan sebagai upaya perbaikan yang harus dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dalam rangka peningkatan kapasitas daerah dan menekan terjadinya temuan pada pemeriksaan selanjutnya.



Terhadap 328 temuan, Inspektorat telah memberikan 407 rekomendasi untuk pelaksanaan perbaikan/tindak lanjut. Rekomendasi dirancang untuk memperbaiki kelemahan dan meminimalisasi akibat dari kelemahan yang ada. Pengelompokan rekomendasi temuan hasil audit/pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Rekomendasi Hasil Audit/Pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Semester I Tahun 2023

No	Rekomendasi	Jumlah Kejadian	%	Nilai
1	2	3	4	5
1	Penyetoran ke kas negara/daerah, kas BUMN/D, dan masyarakat	46	11,30%	486.368.307,77
2	Pengembalian barang kepada negara, daerah, BUMN/D, dan masyarakat	0	0,00%	0
3	Perbaikan fisik barang/jasa dalam proses pembangunan atau penggantian barang/jasa oleh rekanan	9	2,21%	22.550.000,00
4	Penghapusan barang milik negara/daerah	0	0,00%	0
5	Pelaksanaan sanksi administrasi kepegawaian	71	17,44%	377.504.344,07
6	Perbaikan laporan dan penertiban administrasi/kelengkapan administrasi	90	22,11%	0
7	Perbaikan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan	0	0,00%	0
8	Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pendukung sistem pengendalian	5	1,23%	0
9	Perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan dan kebijakan	151	37,10%	0
10	Perubahan atau perbaikan struktur organisasi	17	4,18%	0
11	Koordinasi antar instansi termasuk juga penyerahan penanganan kasus kepada instansi yang berwenang	9	2,21%	0
12	Pelaksanaan penelitian oleh tim khusus atau audit lanjutan oleh unit pengawas intern	3	0,74%	0
13	Pelaksanaan sosialisasi	6	1,47%	0
<b>TOTAL</b>		<b>407</b>	<b>100%</b>	<b>886.422.651,84</b>

Berdasarkan tabel 2.2 dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa rekomendasi yang paling sering diberikan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah untuk tindak lanjut hasil pemeriksaan, antara lain:

1. Perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan dan kebijakan (37,10%)
2. Perbaikan laporan dan penertiban administrasi/kelengkapan administrasi (22,11%)
3. Pelaksanaan sanksi administrasi kepegawaian (17,44%)

Disamping itu, berdasarkan nilai temuan rekomendasi yang paling banyak diberikan adalah terkait Penyetoran ke kas negara/daerah, kas BUMN/D, dan masyarakat yaitu sebesar Rp. 486.368.307,77.

Berikut adalah target dan realisasi audit kinerja pada Semester I Tahun 2023.

Tabel 2.3 Realisasi Audit Kinerja Semester I Tahun 2023

No	Kegiatan	PKPT	
		Target	Realisasi
		Jumlah Objek	Jumlah Objek
1	Pengawasan Umum Penyelenggaraan Pemerintah Daerah – Aspek Pelayanan Publik Urusan Koperasi dan UKM	15	15
2	Audit Kinerja atas Program Perlindungan Sosial dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi	7	6
3	Audit Kinerja BUMD	3	7
4	Audit Kinerja Prioritas Pembangunan Daerah	3	4
<b>Total</b>		<b>28</b>	<b>32</b>

Audit Kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sampai dengan Semester I tahun 2023, antara lain:

- a. Pengawasan umum penyelenggaraan pemerintah daerah – Aspek Pelayanan Publik dan Urusan Koperasi dan UKM

Inspektorat melaksanakan kegiatan Pengawasan umum penyelenggaraan pemerintah Aspek Pelayanan Publik dan Urusan Koperasi dan UKM pada 12 Kabupaten/Kota di Semester I Tahun 2023, yaitu:

- |                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| 1) Kabupaten Klaten       | 7) Kabupaten Wonogiri    |
| 2) Kabupaten Boyolali     | 8) Kota Salatiga         |
| 3) Kabupaten Sragen       | 9) Kota Pekalongan       |
| 4) Kabupaten Purworejo    | 10) Kabupaten Semarang   |
| 5) Kabupaten Purbalingga  | 11) Kabupaten Kab Kendal |
| 6) Kabupaten Banjarnegara | 12) Kabupaten Batang     |



b. Pemeriksaan Kinerja atas Program Perlindungan Sosial Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi

Inspektorat melaksanakan kegiatan pemeriksaan kinerja atas program perlindungan sosial dalam rangka penanganan dampak inflasi pada 6 OPD di Semester I Tahun 2023, yaitu Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

c. Audit Kinerja BUMD

Audit kinerja pada BUMD telah dilaksanakan pada 7 (tujuh) BUMD di Provinsi Jawa Tengah, yaitu PT. Jateng Argo Berdikari Kab. Karanganyar, Semarang, dan Cilacap, PT PDAB Tirta Uatma Jateng Kota Pekalongan, Kab. Batang dan Tegal, serta PT Sarana Pembangunan Jateng Kab. Tegal.

d. Audit Kinerja Prioritas Pembangunan Daerah

Audit Kinerja Prioritas Pembangunan Daerah bertujuan untuk menilai kinerja prioritas pembangunan daerah yang meliputi audit atas aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Audit telah dilaksanakan pada 4 OPD Provinsi Jawa Tengah, yaitu Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang.

## 2. Audit dengan Tujuan Tertentu (ADTT)

Audit dengan tujuan tertentu merupakan pemeriksaan yang bertujuan untuk meyakini kesesuaian pelaksanaan kegiatan, program, atau hal lain yang tidak termasuk dalam kategori audit keuangan dan audit kinerja. Adapun ADTT yang telah dilakukan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah pada Semester I Tahun 2023, antara lain:

a. Audit Kepatuhan

Audit Kepatuhan telah dilaksanakan sebanyak 8 (delapan) kali, yaitu SMKN Jumo, SMKN 1 Warureja Kab Tegal, SMAN 1 Warureja Kab Tegal, SMKN 9 Surakarta, SMAN 4 Surakarta, SMAN 1 Pringsurat, SMAN 7 Surakarta, dan SMKN 6 Surakarta.

b. Audit Khusus/Kasus/Aduan Masyarakat/Investigasi

Inspektorat telah melaksanakan 11 (sebelas) kali audit, yaitu SMKN 1 Blado (Dana BOS dan PSM), Dugaan Penyimpangan Bantuan Keuangan



Gubernur di Desa Bawu Kec Batealit Kab Jepara, Desa Watu Bonang Kec Tawanghari Kab Sukoharjo, Desa Tegalsari Kec Weru Kab Sukoharjo, dan Desa Balekambang Kec Selomerto Kab Wonosobo, audit limbah Kemendagri, Pembangunan Irigasi di Desa Sendangwulan Kab Kendal, Pembangunan SMA N Tawangmangu Kab Karanganyar, Penggunaan anggaran di SMKN 1 Kendal, Maladministrasi SMKN 1 Wadaslintang Kab Wonosobo, dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terkait tipikor dana hibah ternak.

c. Audit Bantuan Keuangan Gubernur

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Audit Bantuan Keuangan Gubernur sebanyak 6 (enam) kali yaitu pada Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Tegal.

d. Audit Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Audit Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa pada Semester I tahun 2023 sebanyak 6 (enam) kali yaitu pada Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Tegal, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Banyumas, Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Magelang.

e. Audit TIK SPBE

Audit TIK SPBE bertujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara aplikasi SPBE dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan audit TIK SPBE pada Maret 2023 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Tabel 2.4 Target dan Realisasi ADTT Semester I Tahun 2023

No	Kegiatan	PKPT	
		Target	Realisasi
		Jumlah Objek	Jumlah Objek
1	Audit Kepatuhan	8	8
2	Bantuan Keuangan ke Kab/Kota	3	6
3	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa	9	6
4	Audit Khusus/Kasus/Aduan Masyarakat/Investigasi	12	11
5	Audit TIK SPBE	2	2
<b>Total</b>		<b>34</b>	<b>33</b>



Tabel di atas menunjukkan target dan realisasi ADTT pada Semester I 2023. Dalam hal ini ADTT dapat direalisasikan hampir sesuai dengan target yang tercantum dalam PKPT 2023.

## B. Reviu

Dalam menjalankan perannya, APIP telah mengalami pergeseran paradigma yaitu dari yang sebelumnya *watch dog* (sekedar mencari-cari kesalahan) menjadi lebih fokus pada unsur pembinaan yang bersifat pencegahan (*preventive*), konsultasi (*consultative*), dan pemberian keyakinan (*quality assurance*), pada program-program strategis yang mempunyai risiko tinggi terhadap penyimpangan, *early warning system*, pendampingan, dan pembinaan. APIP seyogyanya mampu mengawal dalam mencapai nilai, tujuan, dan sasaran utama melalui proses *quality assurance* dan mengarahkan manajemen dalam mengelola organisasi pengawas internal serta mengarahkan manajemen dalam mengelola organisasi. Hal tersebut akan menghasilkan *long-term values* bagi organisasi pada area tata kelola, risiko, dan pengendalian dengan sudut pandang *oversight*, *insight*, dan *foresight*, khususnya dalam rangka mengawal kebijakan dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan serta menjamin agar kegiatan pelaksanaan rencana sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan, baik yang bersifat substansial maupun prosedural.

Salah satu tugas APIP dalam melaksanakan perannya ialah dengan melakukan kegiatan reviu. Reviu merupakan penelaahan bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan reviu-reviu pada Semester I Tahun 2023, antara lain:

### 1. Reviu Standar Satuan Harga

Analisis Standar Belanja (ASB) merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Standar Harga Satuan (SSH) merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional, sedangkan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) merupakan harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan SHS sebagai elemen penyusunannya.



Penetapan biaya standar dimaksudkan sebagai upaya preventif menekan penyalahgunaan anggaran. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah melaksanakan reviu SSH dan ASB Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada bulan Mei 2023 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa dengan ruang lingkup reviu proses penetapan, kewajaran besaran harga/nilai dan kesesuaian ASB dengan SSH.

## 2. Reviu Tata Kelola Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa

Inspektorat telah melaksanakan Reviu Pengadaan Barang dan Jasa pada 22 s.d 26 Mei 2023 pada Biro Administrasi Pengadaan Barang /Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

## 3. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melakukan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah TA 2022 dengan hasil opini LKPD adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK RI. Hal tersebut merupakan predikat ke-12 kali berturut-turut yang diperoleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Berikut adalah rekapitulasi hasil perolehan opini BPK atas LKPD Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 2.5 Perolehan Opini BPK atas LKPD Provinsi Jawa Tengah

Tahun Anggaran	Opini BPK RI
2011	Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP)
2012	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2013	Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP)
2014	Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP)
2015	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2022	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

4. Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 pada Maret 2023 pada Biro Pemerintah, Otonomi Daerah dan Kerjasama.

5. Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Reviu Rancangan Akhir RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 pada Maret 2023 di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

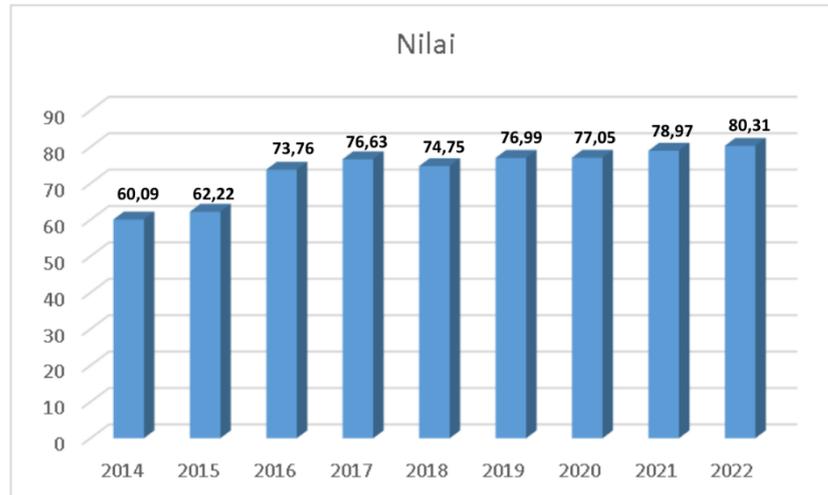
6. Reviu Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melakukan reviu PMPRB pada seluruh perangkat daerah (49 OPD) di lingkungan Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi telah disajikan dengan data dukung yang akurat, andal, dan valid. Pelaksanaan reformasi birokrasi akan dilakukan evaluasi oleh Kemenpan RB dan menghasilkan nilai Indeks Reformasi Birokrasi.

Berikut adalah rincian hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 dan indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah setiap tahun dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah.

Tabel 2.6 Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

No	Komponen Penilai	Bobot	Nilai		
			2020	2021	2022
<b>A. Komponen Pengungkit</b>					
1.	Pemenuhan	10,00	15,12	16,92	18,36
2.	Hasil Antara Area Perubahan	30,00	6,65	6,52	7,10
3.	Reform	60,00	19,37	21,06	21,87
<b>Total Komponen Pengungkit</b>		<b>60,00</b>	<b>41,14</b>	<b>44,50</b>	<b>47,33</b>
<b>B. Komponen Hasil</b>					
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	8,64	8,71	8,68
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,93	8,76	9,20
3.	Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	9,30	8,56	8,51
4.	Kinerja Organisasi	10,00	9,05	8,44	6,59
<b>Total Komponen Hasil</b>		<b>40,00</b>	<b>35,91</b>	<b>34,47</b>	<b>32,98</b>
<b>Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)</b>		<b>100,0</b>	<b>77,05</b>	<b>78,97</b>	<b>80,31</b>



Grafik 2. 1 Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Setiap Tahun

pada tahun 2022 mencapai 80,31 dengan memperoleh predikat “A”. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menerima penghargaan atas Predikat A pada indeks Reformasi Birokrasi di Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 2.2 Penerimaan Penghargaan Predikat A atas Indeks Reformasi Birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

7. **Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output Kegiatan DAK Fisik**

Inspektorat melakukan reviu atas Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output DAK Fisik Tahun 2023 di bidang kelautan dan perikanan, irigasi, kesehatan dan KB, jalan, air minum, pertanian, dan pendidikan yang selesai dilaksanakan pada bulan Juni 2023. Reviu dilakukan pada 7 (tujuh) Perangkat Daerah, yaitu:



- 1) Dinas Kelautan dan Perikanan
- 2) Dinas Pekerjaan Umum, Sumber Daya Air dan Penataan Ruang;
- 3) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
- 3) Dinas Pertanian dan Perkebunan;
- 4) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- 6) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- 7) RSUD Dr. Moewardi.

8. Reviu Manajemen ASN

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan Reviu Manajemen ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah periode April 2022 s.d April 2023 berupa Reviu Promosi, Rotasi, dan Mutasi ASN serta hasil penilaian survei penilaian integritas (SPI) tahun 2022 di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah. Reviu dilaksanakan pada tanggal 8 s.d 10 Mei 2023.

9. Reviu Tata Kelola Barang Milik Daerah

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan Reviu Tata Kelola Barang Milik Daerah TA 2022 dan Triwulan I TA 2023 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang telah selesai dilaksanakan pada 5 s.d 11 Mei 2023.

10. Reviu Tata Kelola Pajak Daerah

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan Reviu Tata Kelola Pajak Daerah TA 2022 dan Triwulan I TA 2023 pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah pada 5 s.d 11 Mei 2023.

11. Reviu Realisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)

Reviu realisasi peningkatan P3DN bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa kelengkapan dokumen dan prosedur pengadaan barang jasa sesuai dengan ketentuan. Inspektorat melakukan reviu P3DN sesuai dengan permohonan dari OPD. Pada semester I tahun 2023 Inspektorat telah melaksanakan reviu pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pusdataru, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Bidang Penghubung, Biro Umum Setda, RSUD Margono Soekarjo, RSUD Tugurejo, dan RSJD Amino Gondohutomo.

### C. Pemantauan

Pemantauan merupakan proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan pemantauan terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) dan pemantauan atas limpahan kasus aduan masyarakat ke Kabupaten/Kota. Hasil pemantauan TLHP dan limpahan kasus aduan masyarakat ke Kabupaten/Kota lebih rinci dijelaskan pada BAB III dan BAB IV.

### D. Evaluasi

Kegiatan Evaluasi yang dilakukan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah pada semester I Tahun 2023, antara lain:

#### 1. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah atas LPPD Kab/Kota Tahun 2022 telah dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah pada 14 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada Bulan Juni 2023.

#### 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (SAKIP) Perangkat Daerah

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sendiri dalam Evaluasi SAKIP, memeriksa 41 OPD di Provinsi Jawa Tengah. Nilai SAKIP OPD Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 masih-masing dapat dilihat di tabel 2.7.

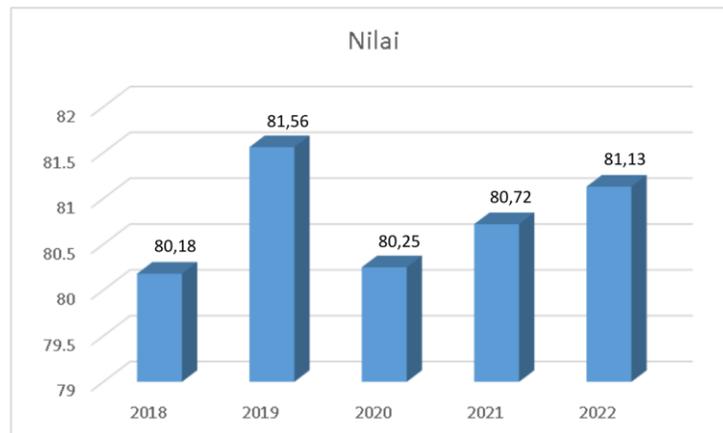
Tabel 2.7 Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP di OPD Provinsi Jawa Tengah

No.	SKDP	NILAI SAKIP 2022	No.	SKDP	NILAI SAKIP 2022
1	RSUD MOEWARDI	89,91	22	DINTANBUN	81,37
2	RSUD MRGN	89,72	23	DIPERMADES	81,32
3	DISHANPAN	89,64	24	RSJD AMINO	81,09
4	DINKES	87,42	25	BAPPEDA	81,02
5	DINAS P3AKB	86,99	26	SET DPRD	80,40
6	DINAS ARPUS	86,70	27	DISNAKERTRANS	80,12
7	RSUD KELET	85,18	28	BAPENDA	79,83
8	INSPEKTORAT	85,13	29	DINAS SOSIAL	79,63
9	RSUD TUGUREJO	85,12	30	BPKAD	79,41
10	DINLUTKAN	83,44	31	DINKOP UKM	79,36
11	BPSDMD	83,30	32	BKD	79,17
12	DINAS LHHUT	83,24	33	DINAS PERKIM	79,08
13	DISNAKKESWAN	83,22	34	BADAN PENGHUBUNG	78,56
14	RSJD SOEJARWADI	83,16	35	DINAS PERHUBUNGAN	78,18
15	RSJD SURAKARTA	83,16	36	SETDA	77,18

No.	SKDP	NILAI SAKIP 2022
16	DINAS PUBMCK	83,04
17	DINAS ESDM	82,97
18	DINAS PUSDATARU	82,91
19	DISPERINDAG	82,80
20	DPMPTSP	82,01
21	DISKOMINFO	81,47

No.	SKDP	NILAI SAKIP 2022
37	SATPOL PP	77,14
38	DISDIK	77,04
39	BAKESBANGPOL	76,77
40	SET BPBD	76,22
41	DISPORAPAR	76,22

Evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Kemenpan RB untuk SAKIP Tahun 2022 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperoleh nilai 81,13 atau predikat “A”. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah baik. Nilai SAKIP Provinsi Jawa Tengah dari tahun ke tahun dapat dilihat pada Gambar 2.3.



Grafik 2. 2 Grafik Nilai SAKIP Provinsi Jawa Tengah dari Tahun 2018 s.d. 2022

Evaluasi SAKIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 dilaksanakan pada Bulan Juli. Evaluasi dilaksanakan dengan mengevaluasi 41 OPD.

### 3. Evaluasi Benturan Kepentingan

Evaluasi benturan kepentingan dilaksanakan untuk mendorong pelaksanaan Refomasi Birokrasi dan pembentukan Zona Integritas dengan guna mewujudkan pemerintah yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, efisien, memberikan



pelayanan publik yang baik dan berkualitas. Dalam hal evaluasi benturan kepentingan, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah akan mengevaluasi implementasi penanganan benturan kepentingan di OPD Provinsi Jawa Tengah.

Evaluasi benturan kepentingan dilaksanakan untuk mendorong pelaksanaan Refomasi Birokrasi dan pembentukan Zona Integritas dengan guna mewujudkan pemerintah yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, efisien, memberikan pelayanan publik yang baik dan

Pada Semester I tahun 2023, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melakukan penghimpunan data *self assessment* identifikasi benturan kepentingan dari seluruh OPD. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya agar OPD dapat mendeteksi kemungkinan terjadinya penyimpangan.

## **E. Pengawasan Lainnya**

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah mempunyai tambahan tugas untuk menindaklanjuti kebijakan/program nasional dalam hal Reformasi Birokrasi khususnya dalam rangka penguatan pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Berkaitan dengan hal tersebut, Inspektorat mengemban tugas dalam Pengendalian Gratifikasi, Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negera (LHKASN), Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), Monitoring MCP Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (KORSUPGAH), pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), serta Kapabilitas APIP.

### **1. Pengendalian Gratifikasi**

Pengendalian Gratifikasi di Jawa Tengah telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 (yang merupakan pembaruan dari Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2014) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Melalui peraturan Gubernur tersebut, telah dibentuk Subadmin Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang berkedudukan di seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Jawa Tengah selain Inspektorat dan BUMD dengan harapan Perangkat Daerah tersebut dapat menjadi agen Program Pengendalian Gratifikasi (PPG).



Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dalam hal pengendalian gratifikasi di Jawa Tengah berkedudukan sebagai Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) yang bertugas untuk melakukan fungsi pengendalian gratifikasi. Berdasarkan rencana kerja penerapan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 beberapa kegiatan pengendalian gratifikasi yang dilakukan adalah melaksanakan sosialisasi kepada CPNS baru, Perangkat Daerah, dan seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta penyampaian informasi gratifikasi melalui media sosial. Pada Semester I Tahun 2023, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah menerima pengaduan gratifikasi sebanyak 13 laporan dari 6 (enam) OPD dengan nilai Rp. 4.260.000,00. Rincian pelaporan gratifikasi dapat dilihat pada tabel 2.8.

Tabel 2.8 Rincian Pelaporan Gratifikasi Provinsi Jawa Tengah Semester I Tahun 2023

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Nominal
1	Inspektorat	4	330.000,00
2	RSUD Dr. Moewardi	1	200.000,00
3	Biro Administrasi Pengadaan Barang Jasa	2	980.000,00
4	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4	1.300.000,00
5	Dinas Koperasi dan UKM	1	950.000,00
6	Dinas Kesehatan	1	500.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>13</b>	<b>4.260.000,00</b>

2. Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)

Inspektorat telah melakukan fasilitasi LHKPN pada seluruh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah pada awal tahun 2023 untuk pelaporan LHKPN tahun 2022. Pelaporan LHKPN merupakan salah satu upaya strategis pencegahan korupsi melalui penerapan asas transparansi bagi aparatur negara. Sesuai dengan SK Gubernur Jawa Tengah No. 700/10 tanggal 7 Juli 2017 tentang wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bahwa seluruh pejabat eselon dan BUMD wajib untuk melaporkan LHKPN sebagai persyaratan seleksi pengangkatan Pejabat Struktural dan seluruh ASN Provinsi Jawa Tengah untuk melaporkan LHKPN.

Pada tahun 2022 Inspektorat Provinsi Jawa Tengah terdapat 74 pejabat (100%) wajib lapor dan 64 ASN (100%) wajib lapor yang sudah melaporkan harta

kekayaannya. Sedangkan, di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 wajib Laporan pejabat yang sudah melaporkan sebanyak 1706 orang dari 1706 orang (100%).

Adapun pengelolaan LHKPN selama 5 (lima) tahun terakhir di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9 Rekapitulasi Penanganan LHKPN

Tahun	Jumlah Wajib LHKPN	Sudah Laporan	Belum Laporan
2018	2.392	2.392 (100%)	0
2019	2.419	2.419 (100%)	0
2020	2.320	2.320 (100%)	0
2021	2.283	2.283 (100%)	0
2022	1.706	1.706 (100%)	0

Sementara untuk jumlah Wajib LHKASN per 31 Desember 2022 yang telah melapor harta kekayaannya sebanyak 36.281 (100%) dari 36.281 Wajib LHKASN.

Tabel 2.10 Rekapitulasi Penanganan LHKASN

Tahun	Jumlah Wajib LHKASN	Sudah Laporan	Belum Laporan
2021	38.198	38.198 (100%)	0 (0%)
2022	36.281	36.281 (100%)	0 (0%)

### 3. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)

Stranas PK merupakan arah kebijakan nasional yang memuat fokus sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia. Rencana aksi pencegahan korupsi terdiri dari perencanaan berbasis elektronik dan implementasi e-katalog dan *e-payment*. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu melakukan pemenuhan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Tujuan Stranas PK adalah:

- Memberikan arahan tentang upaya strategis yang perlu dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
- Mendorong program pencegahan korupsi yang berorientasi pada hasil (outcome) dan dampak (impact) bukan hanya luaran kegiatan (output) dengan capaian yang terukur.



- c. Meningkatkan sinergi antara program pencegahan korupsi dengan kebijakan pemerintah pusat.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melaporkan hasil rencana aksi setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Timnas PK melalui aplikasi <https://jaga.id/monitoring>. Total capaian pada periode B03 (Triwulan I 2023-2024) sebesar 23,2%. Saat ini sedang dilakukan untuk pemenuhan data dukung untuk periode B6 (Triwulan II 2023-2024).

Stranas PK pelaporan tahun 2023-2024. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu melakukan pemenuhan data dukung dan melakukan pelaporan dalam aplikasi Stranas PK ([jaga.id](https://jaga.id)), yang terdiri atas penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta, integrasi perencanaan, penganggaran dan pelaporan untuk sinergi program pengentasan kemiskinan ekstrim 2023 dan 2024, perbaikan kinerja belanja pembangunan melalui peningkatan efektifitas audit pengadaan barang/jasa pemerintah, optimalisasi interoperabilitas data berbasis NIK untuk program pemerintah yang didalamnya memuat 9 *milestone*. Aksi Stranas PK tersebut menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk dipenuhi data dukungnya secara rutin setiap triwulan sampai dengan periode terakhir sesuai tupoksi berada pada 6 Perangkat Daerah yaitu:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  - b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  - c. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
  - d. Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  - e. Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Jawa Tengah;
  - f. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.
4. Monitoring MCP Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (KORSUPGAH)

*Monitoring Center for Prevention* (MCP) merupakan rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi yang difokuskan pada pembangunan sistem dan langkah-langkah perbaikan tata kelola pemerintahan dengan melakukan penilaian pada 7 area intervensi yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak



daerah, dan manajemen aset daerah yang bertujuan untuk mengurangi risiko dan potensi korupsi. Adapun capaian MCP Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 adalah **94,81** dan termasuk dalam peringkat 7 Nasional. Rincian capaian dapat dilihat pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11 Perbandingan Capaian MCP KORSUPGAH Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020, 2021, dan 2022

No.	Area Intervensi	2020	2021	2022
1	Perencanaan & Penganggaran APBD	100	92	91,25
2	Pengadaan Barang dan Jasa	90,7	97,8	99,1
3	Perizinan	95	97,4	100
4	Pengawasan APIP	96,9	95,9	91,4
5	Manajemen ASN	97,4	99,5	100
6	Optimalisasi Pajak Daerah	59,9	85,9	87,74
7	Manajemen Aset Daerah	91,6	91,9	93,73
<b>Total</b>		<b>89,90</b>	<b>94,50</b>	<b>94,81</b>

Pada tahun 2023 terdapat 30 indikator dan 63 sub indikator pada 8 area intervensi sebagai fokus area program pencegahan korupsi pemerintah daerah. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan Rapat Pembahasan Pemenuhan Data MCP pada 7 Juni 2023 dengan menghadirkan 7 (tujuh) OPD yang memegang tugas dan fungsi sesuai area intervensi untuk saling berkoordinasi dalam memenuhi data dukung yang dibutuhkan untuk penilaian MCP Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

5. Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Pembangunan Zona Integritas (ZI) telah dimulai dengan penandatanganan Pencanangan Zona Integritas secara serentak dengan Pemerintah Kabupaten/Kota pada tanggal 26 Mei 2014 yang disaksikan Menteri PAN dan RB-RI, Ketua Ombudsman RI dan Perwakilan KPK-RI. Berikut adalah daftar OPD yang memperoleh predikat WBK dan WBBM dari KemenPAN dan RB.

Tabel 2.12 Daftar OPD yang Memperoleh Predikat WBK

No	Organisasi Perangkat Daerah	Tahun Perolehan
1	RSUD Kelet Jepara	2017
2	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	2017

No	Organisasi Perangkat Daerah	Tahun Perolehan
3	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	2019
4	RSJD Surakarta	2019
5	DPMPTSP	2020
6	Cabdin DLHK Wilayah I	2020
7	BPSDMD	2021
8	BPSMB (Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang) Surakarta	2021
9	Balatkop (Balai Pelatihan Koperasi dan UKM)	2021

Tabel 2.13 Daftar OPD yang Memperoleh Predikat WBBM

No	Organisasi Perangkat Daerah	Tahun Perolehan
1	RSUD Prof. Margono Soekarjo	2019
2	RSUD Dr. Moewardi	2020
3	RSUD Tugurejo	2021

Tahun 2022 Inspektorat Provinsi Jawa Tengah selaku Tim Penilai Internal (TPI) telah melaksanakan tahap penilaian internal untuk menilai OPD yang akan diusulkan menuju WBK/WBBM. Terdapat 4 unit kerja yang diusulkan tetapi hasil dari usulan ke 4 OPD tersebut belum memenuhi kualifikasi untuk mendapatkan predikat WBK ataupun WBBM sesuai dengan usulannya.

- a. Unit Kerja yang diusulkan WBBM , antara lain:
  - 1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
  - 2) RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Klaten.
- b. Usulan unit kerja yang diusulkan WBK, antara lain:
  - 1) Balai Kesehatan Indera Masyarakat (BKIM)
  - 2) Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

Pada Tahun 2023 Inspektorat, Biro Organisasi Setda, dan BKD selaku Tim penilai Internal kembali melakukan penilaian terhadap 60 Unit Kerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan hasil penilaian terdapat 7 Unit Kerja yang dapat diusulkan WBM dan WBK ke Tim Penilai Nasional. Sampai dengan saat ini usulan tersebut masih dalam proses seleksi. Sebanyak 7 (Tujuh) Unit Kerja yang diusulkan terdapat 5 (Lima) OPD yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dengan catatan



dan harus memenuhi beberapa data dukung yang masih kurang. Berikut adalah daftar unit kerja yang lulus seleksi administrasi dengan catatan.

Tabel 2.14 Daftar OPD Lulus Seleksi Administrasi dengan Catatan

No	Unit Kerja	Usulan
1	BPSDMD	WBBM
2	RSJD RM Soedjarwadi	WBBM
3	Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan (BalabkesPAK)	WBK
4	Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Sensorik Netra (PPSDSN) Pendowo Kudus	WBK
5	Balai Kesehatan Indera Masyarakat (BKIM)	WBK

#### 6. Telaah Sejawat Ekstern

Telaah Sejawat Ekstern, pada Inspektorat Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Tugas Inspektur Provinsi Jawa Tengah Nomor 094/399/TU/2021 tanggal 25 November 2021. Telaah sejawat ekstern dilakukan dengan tujuan untuk menilai kesesuaian (conformance) praktik pengawasan intern pada Inspektorat Provinsi Jawa Timur terhadap standar. Selain itu, telaah sejawat ekstern dilakukan untuk memperbaiki dan/atau meningkatkan efektivitas penerapan kode etik auditor intern, efisiensi dan efektivitas kegiatan pengawasan intern, serta pemenuhan harapan para pemangku kepentingan terhadap APIP. Berdasarkan hasil penelaahan, nilai kesesuaian praktik pengawasan intern pada Inspektorat Provinsi Jawa Timur terhadap standar adalah 79,31%, dengan katagori penilaian “Cukup”. Rincian nilai per standar adalah sebagai berikut: (1) Standar Atribut mendapat 91% dan (2) Standar Pelaksana mendapat 68%.

Selain melakukan telaah sejawat ke Inspektorat Provinsi Jawa Timur, penelaahan terhadap Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sendiri dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat. Secara umum hasil telaah sejawat mendapat nilai rata-rata **64,61** atau dengan kategori “**Cukup Baik**”. Nilai pada prinsip-prinsip dasar memperoleh 76,67%, standar umum memperoleh 66,93%, standar pelaksanaan audit intern memperoleh 43,75%, dan standar komunikasi audit intern mendapat 71,11%.

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah juga ditelaah oleh Inspektorat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nilai **77,56** dengan kategori “**Cukup**”. Rincian Penilaiannya dapat dilihat di tabel 2.15.

Tabel 2.15 Hasil Telaah Sejawat Inspektorat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Indikator Penilaian	Nilai
<b>Standar Atribut</b>	<b>81,01%</b>
Tujuan, Kewenangan, dan Tanggung Jawab APIP (Audit Charter)	5,00%
Independensi dan Objektivitas	0,00%
Kompetensi dan Kecermatan Profesional	2,33%
Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas	6,75%
<b>Standar Pelaksanaan</b>	<b>74,12%</b>
Mengelola Kegiatan Audit Intern	4,74%
Sifat Dasar Pekerjaan	0,00%
Perencanaan Penugasan	5,00%
Pelaksanaan Penugasan	1,50%
Komunikasi Hasil Penugasan	0,16%
Pemantauan Tindak Lanjut	3,33%
<b>Total Nilai</b>	<b>77,56</b>

Telaah sejawat tahun 2023 masih menunggu jadwal dari Komite Telaah Sejawat Dewan Pengurus Nasional (DPN) AAIPU Pusat. Tahun 2023, Inspektorat akan dinilai/ditelaah atas praktik pengawasan intern oleh Inspektorat Provinsi Lampung.

#### 7. Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dengan nomor PE.09.03/LHP-768/PW11/6/2022 tanggal 30 November 2022, disimpulkan bahwa Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Jawa Tengah berada pada “Level 3” dengan skor 3,000. Capaian ini sekaligus telah menjawab target kapabilitas APIP tahun 2022 yang termuat dalam Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Adapun rincian capaian kapabilitas APIP terdiri dari 6 (enam) elemen sebagai berikut:

Tabel 2.16 Elemen Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

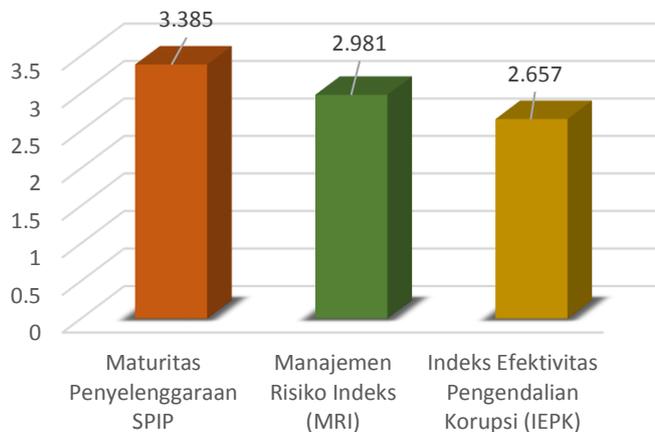
No.	Elemen	Level	Skor
<b>Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)</b>			
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,540
2.	Praktik Profesional	3	0,540
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,180
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,180
5.	Struktur Tata Kelola	3	0,360
<b>Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)</b>			
6.	Peran dan Layanan	3	1,200
<b>Simpulan Entitas</b>		<b>3</b>	<b>3,000</b>

Pada tahun 2023, penilaian mandiri Kapabilitas APIP dilaksanakan di bulan Juni 2023. Sampai dengan saat ini sedang memasuki tahap evaluasi oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

8. Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi

Pelaksanakan kegiatan Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi dilaksanakan pada 49 OPD. Pada tahun 2023, Penilaian Mandiri SPIP dilakukan secara bertahap. Tahap pertama dilaksanakan di bulan Mei 2023 dengan menilai 13 OPD. Tahap kedua dilaksanakan pada Juni 2023 dengan menilai 22 OPD, dan tahap ketiga akan dilaksanakan pada bulan Juli 2023 dengan menilai 14 OPD. Hasil penilaian tersebut belum seluruhnya selesai, karena masih berlangsung penilaian tahap ketiga.

Berikut adalah penilaian rata-rata Penjaminan Kualitas PM SPIP dari 49 OPD di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 dapat dilihat pada Grafik 2.3 dibawah ini.



Grafik 2. 3 Nilai rata-rata 49 OPD Provinsi Jawa Tengah Hasil dari Penjaminan Kualitas SPIP Terintegrasi

9. Monitoring Realisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)

Dalam mengawal komitmen dan realisasi P3DN, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah melakukan monitoring pada OPD-OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Monitoring dilakukan dengan menggunakan aplikasi SISWASP3DN sesuai dengan Standar Audit AAIFI. Monitoring telah dilaksanakan pada periode TW IV Tahun 2022 dan TW I Tahun 2023.

### BAB III

## HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meliputi Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP yang terdiri Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Dalam upaya percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah dilakukan upaya antara lain dengan mengadakan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan secara berkala dengan pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan tindak lanjut. Kegiatan pemantauan tindak lanjut ke Kabupaten/Kota dan perangkat daerah melalui penugasan untuk memantau tindak lanjut hasil pengawasan periode sebelumnya.

Perkembangan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan belum sepenuhnya selesai. Terdapat rekomendasi yang masih dalam proses dan/atau belum ditindaklanjuti. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain rekomendasi memerlukan waktu penyelesaian cukup lama, temuan sulit ditindaklanjuti, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan yang baru terbit.

#### A. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI

Pada tahun 2023 BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah telah menyelenggarakan 1 (satu) kali pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan yaitu pada bulan Juni 2023. Pemantauan tindak lanjut dilakukan terhadap hasil pemeriksaan tahun 2005 s.d. tahun 2023 sebanyak 59 LHP dengan jumlah temuan sebanyak 769 temuan dan 1.844 rekomendasi. Rekapitulasi status tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI semester 1 2023 tercantum dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Status Tindak Lanjut BPK RI Tahun 2005 s.d. 2023

Tahun IHPS	Temuan	Rekom	Status Pemantauan Tindak Lanjut			
			Sesuai	Belum Sesuai	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah
			Jml	Jml	Jumlah	Jumlah
2005	30	44	44	-	-	-
2006	32	48	48	-	-	-
2007	23	47	47	-	-	-
2008	71	136	97	-	-	39



Tahun IHPS	Temuan	Rekom	Status Pemantauan Tindak Lanjut			
			Sesuai	Belum Sesuai	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah
			Jml	Jml	Jumlah	Jumlah
2009	24	48	37	11	-	-
2010	52	93	91	2	-	-
2011	45	131	131	0	-	-
2012	44	91	82	9	-	-
2013	66	142	142	-	-	-
2014	70	156	146	10	-	-
2015	52	160	143	17	-	-
2016	55	161	148	13	-	-
2017	32	71	65	6	-	-
2018	43	107	101	6	-	-
2019	35	82	68	14	-	-
2020	56	196	174	22	-	-
2021	29	84	73	22	-	-
2022	10	29	17	12	-	-
2023	10	18	-	-	18	-
<b>Jumlah</b>	<b>779</b>	<b>1.844</b>	<b>1.657</b>	<b>130</b>	<b>18</b>	<b>39</b>

\*data per 4 Juli 2023

\*Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran 1

Berdasarkan hasil telaah BPK RI, capaian penyelesaian tindak lanjut pada semester II tahun 2022 yaitu 93,04% dengan rincian sesuai sebesar 90,09%, belum selesai 7,12%, belum ditindaklanjuti 0,00%, dan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebesar 2,14%.

Pada Semester 1 Tahun 2023 terdapat 18 rekomendasi yang belum ditindak lanjut berkaitan dengan LHP Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) TA 2022, tetapi setelah dilakukan pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) atas LHP BPK RI di bulan Juni 2023 seluruh rekomendasi pada LHP LKPD TA 2022 telah ditindaklanjuti dan sampai bulan Juli 2023 masih menunggu hasil telaah dari BPK untuk mendapatkan status tindak lanjut atas rekomendasi tersebut.

## B. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP

### 1. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah menggunakan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Online (SIMWAS) Online. Data temuan dan rekomendasi atas hasil pemeriksanaan Inspektorat Provinsi



Jawa Tengah pada semester I tahun 2023 sebanyak 328 Temuan dan 407 Rekomendasi. Rekomendasi pada Tahun 2022. Sebanyak 106 rekomendasi (26,04%) telah selesai ditindaklanjuti, 62 rekomendasi (15,23%) masih dalam proses tindak lanjut, dan 239 (58,72%) rekomendasi belum ditindaklanjuti. Rincian dari banyaknya temuan dan rekomendasi tiap tahunnya dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Status Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan SIMWAS Online (Jumlah Temuan)

Tahun	Temuan	Rekomendasi	Temuan Selesai Tidak Lanjut	Rekom yang Selesai TL	% Selesai	Temuan Dalam Proses TL	Rekom Dalam Proses TL	% Dalam Proses
2014	1.818	2.523	1.806	2.494	98,85%	12	29	2,05%
2015	2.260	3.100	2.250	3.085	99,52%	10	15	0,48%
2016	2.115	2.862	2.085	2.820	98,53%	30	42	1,47%
2017	1.168	1.789	1.160	1.769	98,88%	8	20	1,12%
2018	1.641	2.371	1.629	2.353	99,24%	12	18	0,76%
2019	1.529	2.057	1.519	2.042	99,27%	10	15	0,73%
2020	775	1.020	762	1.002	98,24%	13	18	1,76%
2021	884	1.404	839	1.330	94,73%	45	74	5,27%
2022	1.412	1.916	1004	1380	72,03%	408	536	27,97%
2023	328	407	101	106	26,04%	227	301	73,96%
<b>Grand Total</b>	<b>13.930</b>	<b>19.449</b>	<b>13.115</b>	<b>18.381</b>	<b>94,51%</b>	<b>775</b>	<b>1.086</b>	<b>5,49%</b>

\* Data per 5 Juli 2023

\* Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran 2

Tabel 3.3 Status Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan SIMWAS Online (Jumah Nilai)

Tahun	Nilai Total Temuan Pemeriksaan	Nilai Total Rekom	Nilai Rekom yang Selesai TL	% Selesai	Nilai Rekom Dalam Proses TL	% Dalam Proses
2014	3.316.675.110,62	3.316.675.110,62	3.012.797.841,03	90,84%	303.877.269,59	9,16%
2015	5.913.404.678,10	5.913.404.678,10	4.476.587.060,71	76,30%	1.436.817.617,39	24,30%
2016	13.647.828.386,06	13.647.828.386,06	13.509.617.369,55	98,99%	138.211.016,51	1,01%
2017	1.594.602.531,09	1.594.602.531,09	1.583.737.349,64	99,32%	10.865.181,45	0,68%
2018	2.049.627.784,04	2.049.627.784,04	1.901.409.147,40	92,77%	148.218.636,64	7,23%
2019	4.322.690.131,30	4.322.690.131,30	4.301.791.580,63	99,52%	20.898.550,67	0,48%
2020	1.504.235.041,96	1.504.235.041,96	1.184.639.871,96	78,75%	319.595.170,00	21,25%
2021	1.627.934.672,04	1.627.934.672,04	1.592.562.172,04	97,83%	35.372.500,00	2,17%
2022	35.989.337.481,62	35.989.337.481,62	35.240.070.555,02	97,91%	749.266.926,58	2,08%
2023	886.422.651,84	886.422.651,84	160.694.573,00	18,13%	725.728.078,84	81,87%
<b>Grand Total</b>	<b>70.852.758.468,67</b>	<b>70.852.758.468,67</b>	<b>62.487.320.460,27</b>	<b>88,19%</b>	<b>8.365.438.008,4</b>	<b>12,81%</b>

\* Data per 5 Juli 2023

\* Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran 2



## 2. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri

Menteri Dalam Negeri pada bulan April 2021 telah memberikan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai 10 Provinsi yang Tepat Waktu dalam Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2019. Prestasi ini menunjukkan komitmen Provinsi Jawa Tengah dalam memperbaiki Sistem Pemerintahan melalui pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Pada Tahun 2022, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah mengawal kegiatan pemeriksaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri pada bulan November. Pemeriksaan tersebut terkait Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 dengan nomor 700.1.2.1/272/IJ. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat 9 Temuan dengan 14 Rekomendasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, semua temuan merupakan temuan administratif.

Tabel 3.4 Status Tindak Lanjut Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023

NO	ASPEK PENGAWASAN	TEMUAN	REKOM	STATUS TLHP				
				ADMINISTRASI				
				S	BS	BD	TPTD	TOTAL
1	Aspek Kepegawaian Pada Perangkat Daerah	1	1	1	0	0	0	1
2	Aspek Keuangan Daerah	4	9	8	1	0	0	9
3	Aspek Pembangunan Daerah	1	1	1	0	0	0	1
4	Aspek Pelayanan Publik di Daerah	1	1	1	0	0	0	1
5	Urusan Ketentraman Dan Keteriban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	1	1	1	0	0	0	1
6	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1	1	1	0	0	0	1
<b>TOTAL</b>		<b>9</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>

\* Data per 6 Juli 2023

\* Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran 3

Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri belum melaksanakan pemeriksaan di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sampai dengan Juli 2023 belum terdapat informasi terkait jadwal pemeriksaan.

## BAB IV HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pengaduan masyarakat yang ditangani Inspektorat Provinsi Jawa Tengah meliputi aduan masyarakat yang ditujukan langsung kepada Gubernur Jawa Tengah, limpahan atau yang diterima dari instansi lain yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Pedoman penanganan pengaduan masyarakat adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Pengaduan Masyarakat Instansi Pemerintah. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sampai dengan Juni 2023 menerima aduan masyarakat sebanyak 26 aduan yang dapat dilihat pada tabel 4.1

Tabel 4.1 Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Sumber Aduan yang Masuk Pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Sumber Aduan	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
Laporgub	137	42	12	1
Limpahan Gubernur	2	4	16	6
Limpahan Irjen	7	4		2
Limpahan KPK	1		1	
Limpahan Menteri	5	3	2	
Limpahan Setneg	12	3	6	1
Media Sosial	13	13	9	3
Surat Aduan/Langsung	25	28	34	13
<b>Grand Total</b>	<b>202</b>	<b>97</b>	<b>80</b>	<b>26</b>

\* Data per 7 Juli 2023

Penanganan aduan masyarakat Semester 1 Tahun 2023 oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yaitu pengaduan dilakukan dengan diperiksa sendiri oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebanyak 14 aduan, pengaduan dilimpahkan ke Kabupaten/Kota sebanyak 7 aduan, dilimpahkan ke OPD sebanyak 1 aduan, dan pengaduan kurang cukup data di awal sebanyak 4 aduan. Aduan-aduan yang kurang cukup data diawal disebabkan karena aduan tersebut sudah diperiksa sebelumnya, informasi tidak lengkap, dan data tidak jelas. Data Pengaduan masyarakat sesuai jenis penanganannya dan klasifikasi jenis aduan dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 4.2 Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Penanganannya Pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Sumber Aduan	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
Kurang Cukup data Diawal	27	5	17	4
Dilimpahkan ke Instansi Vertikal INSTANSI: Irwasda Polda Jateng	3	16	3	0
Dilimpahkan ke Kab/Kota	151	45	31	7
Dilimpahkan ke OPD	3	6	6	1
Diperiksa Inspektorat Provinsi	18	25	23	14
<b>Grand Total</b>	<b>202</b>	<b>97</b>	<b>80</b>	<b>26</b>

\* Data per 7 Juli 2023

Tabel 4.3 Pengaduan Masyarakat Tahun 2023 Berdasarkan Klasifikasi Jenis Aduan

No	Jenis Aduan	Jumlah	Presentase
1	Penyalahgunaan Wewenang	6	23,08%
2	Pelayanan Masyarakat	1	3,85%
3	Korupsi	6	23.08%
4	Pungli	1	3,85%
5	Kepegawaian/Ketenagakerjaan	2	7,69%
6	Pertanahan/Perumahan	1	3,85%
7	Hukum/Peradilan dan HAM	1	3,85%
8	Kewaspadaan Nasional	0	0,00%
9	Tata Laksana/Regulasi	6	23.08%
10	Lingkungan Hidup	2	7,69%
11	Umum	0	0,00%
<b>Total</b>		<b>26</b>	<b>100%</b>

\* Data per 7 Juli 2023

\* Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran 3

#### A. Dilakukan Pemeriksaan Sendiri oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan pemeriksaan aduan masyarakat sebanyak 14 aduan dengan perincian yaitu telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 7 aduan, 4 aduan belum ditindak lanjuti dan 3 aduan masih dalam proses, dengan hasil 3 aduan terbukti dan 4 aduan tidak terbukti.

#### B. Dilimpahkan Penanganannya kepada Kabupaten/Kota

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melimpahkan aduan masyarakat kepada Kabupaten/Kota sebanyak 7 aduan . Semua aduan masih dalam proses tindak lanjut. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.4. di bawah ini.



Tabel 4.4 Pengaduan Masyarakat yang dilimpahkan pada Kabupaten Kota

NO	KOTA	ADUAN DILIMPAHKAN	SELESAI			DALAM PROSES
			T	TT	KET	
1	Kabupaten Wonosobo	2				2
2	Kabupaten Tegal	1				1
3	Kabupaten Kebumen	1				1
4	Kabupaten Demak	1				1
5	Kabupaten Pemasang	1				1
6	Kabupaten Klaten	1				1
<b>TOTAL</b>		<b>7</b>	-	-	-	<b>7</b>

\* Data per 7 Juli 2023

## **BAB V**

### **SIMPULAN, HAMBATAN DAN REKOMENDASI**

#### **A. Simpulan**

1. Tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dalam kegiatan pengawasan meliputi audit/pemeriksaan, evaluasi, revidu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya yang mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.
2. Jumlah temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Semester I tahun 2023 sebanyak 328 temuan yang meliputi temuan kelemahan sistem pengendalian intern sebesar 47,25%, ketidakpatuhan terhadap peraturan sebesar 37,20% dan temuan 3E (Ekonomis, Efektif, dan Efisien) sebesar 15,55% dengan menghasilkan total 407 rekomendasi. Status tindak lanjut yang dinyatakan selesai sebanyak 106 (26,04%) rekomendasi dan 301 (73,96%) rekomendasi masih dalam proses tindak lanjut.
3. Pada Semester I Tahun 2023, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah menerima aduan masyarakat sebanyak 26 aduan, yang terdiri dari surat aduan sebanyak 13 aduan, Laporan Gubernur sebanyak 1 aduan, media sosial sebanyak 3 aduan, limpahan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi sebanyak 2 aduan, limpahan Sekretariat Negara Republik Indonesia sebanyak 1 aduan, dan limpahan Gubernur sebanyak 6 aduan.
4. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI, APIP, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri terdapat rekomendasi yang belum selesai tindak lanjutnya yaitu:
  - a. Hasil pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2022 berdasarkan hasil telaah pada Semester II tahun 2022 terdapat 1.657 (93,04%) rekomendasi yang telah selesai dan 130 (7,12%) rekomendasi masih dalam proses tindak lanjut.
  - b. Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2014 sampai dengan semester I tahun 2023 terdapat 18.381 (94,51%) rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti dan 1.086 (5,49%) rekomendasi masih dalam proses.
  - c. Hasil pemantauan tindak lanjut Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dari tahun 2011 sampai dengan semester I tahun 2023 terdapat 187 temuan



dengan 267 rekomendasi. Berdasarkan status temuan dan rekomendasi tindak lanjut tersebut sebanyak 266 rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti.

## **B. Hambatan**

1. Masih terdapat rekomendasi dari Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang belum dapat maupun sulit ditindaklanjuti.
2. Adanya tugas/mandat yang diberikan oleh Pemerintah Pusat diluar tugas, pokok, dan fungsi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.
3. Keterbatasan pada SIMWAS Online dalam memberikan Informasi yang dibutuhkan terkait monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan adanya error di beberapa menu atau fitur SIMWAS Online.
4. Objek pemeriksaan baik Kabupaten/Kota maupun Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah belum seluruhnya memanfaatkan fasilitas Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS) Provinsi Jawa Tengah.
5. Kurangnya kesadaran Objek pemeriksaan akan pentingnya untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

## **C. Rekomendasi**

1. Lebih aktif dalam hal pemantauan tindak lanjut sehingga tindak lanjut dapat segera diproses oleh auditi.
2. Meningkatkan bimbingan teknis pengawasan terutama audit kinerja di lingkungan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.
3. Melaksanakan *consultant activity* secara aktif terutama pada temuan- temuan yang sering muncul sehingga tidak menjadi temuan berulang.
4. Melakukan *updating system* SIMWAS Online atau pergantian sistem menjadi lebih baik.
5. Melaksanakan sosialisasi dan atau fasilitasi penggunaan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS) Provinsi Jawa Tengah guna percepatan penyelesaian tindak lanjut.
6. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi terkait monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan objek pemeriksaan agar pemenuhan tindak lanjut dapat segera terselesaikan dengan baik.

## LAMPIRAN

### A. Lampiran 1 Status Temuan Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjutnya Hasil Pemeriksaan BPK-RI Tahun 2008 s.d. 2023

No	Objek Pemeriksaan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas daerah
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah		
						Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>TAHUN IHPS</b>		:	<b>2023</b>											
1	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022	10	7.497.408.578,28	18	2.251.514.272,49	-		-		18	2.251,514,272.49			4.874.476.649,78
<b>Jumlah</b>		<b>10</b>	<b>7.497.408.578,28</b>	<b>18</b>	<b>2.251,514,272.49</b>	-		-		<b>18</b>	<b>2,251,514,272.49</b>			<b>4.874.476.649,78</b>
<b>TAHUN IHPS</b>		:	<b>2022</b>											
1	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021	7	3.501.040.727,00	17	1.810.780.000,00	13	1.810.780.000,00	4	0,00	-	0,00	-	0,00	2.150.362.156,00
2	LHP Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah Untuk Menanggulangi Kemiskinan Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Instansi Terkait Lainnya	3	0,00	12	0,00	4		8	0,00	-		-		
<b>Jumlah</b>		<b>10</b>	<b>3.501.040.727,00</b>	<b>29</b>	<b>1.810.780.000,00</b>	<b>4</b>	<b>1.810.780.000,00</b>	<b>24</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	<b>2.150.362.156,00</b>



No	Objek Pemeriksaan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas daerah
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah		
						Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

TAHUN IHPS		:	2021											
1	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020	10	455.859.641,49	20	455.859.641,49	14	145.164.141,49	6	310.695.500,00	-	0,00	-	0,00	145.164.142,00
2	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021	4	0,00	22	0,00	22	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
3	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Efektivitas Penyelenggaraan Kebijakan Penanaman Modal Daerah Tahun Anggaran 2020 Pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Instansi Terkait Lainnya	11	0,00	33	0,00	33	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
4	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri dan Dunia Kerja Dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing TA 2020 s.d. Semester I 2021 Di Provinsi Jawa Tengah	4	0,00	9	0,00	4	0,00	5	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>29</b>	<b>455.859.641,49</b>	<b>84</b>	<b>455.859.641,49</b>	<b>73</b>	<b>145,164,141.49</b>	<b>11</b>	<b>310,695,500.00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>145.164.142,00</b>



No	Objek Pemeriksaan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas daerah
						Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah		
						Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>TAHUN IHPS</b>		:	<b>2020</b>											
1	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Bank pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun Buku 2018 s.d. Triwulan III Tahun 2020 di Provinsi Jawa Tengah	12	0,00	74	0,00	66	0,00	8	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
2	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019	14	943.002.341,33	54	943.002.341,33	42	943.002.341,33	12	0,00	-	0,00	-	0,00	216.912.104,00
3	Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Semarang	9	1.282.856.291,00	15	0,00	15	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
4	Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Kegiatan Investasi dan Operasional PT. Sarana Patra Hulu Cepu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2017 s.d. 2020 (Semester I)	8	4.543.741.029,00	19	4.404.432.999,00	19	4.404.432.999,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	4.309.832.999,00



No	Objek Pemeriksaan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas daerah
						Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah		
						Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Tahun Anggaran 2019 s.d Semester I Tahun 2020 Pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Instansi Terkait Lainnya di Semarang	13	0,00	34	0,00	32	0,00	2	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>56</b>	<b>6.769.599.661,33</b>	<b>196</b>	<b>5.347.435.340,33</b>	<b>174</b>	<b>5.347.435.340,33</b>	<b>22</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.526.745.103,00</b>

TAHUN IHPS		:	2019											
1	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Instansi Terkait Lainnya di Semarang	6	0,00	31	0,00	28	0,00	3	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
2	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional Pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2018 dan 2019 (s.d. Semester I) di Semarang, Jakarta, Pati, Pekalongan, dan Purwokerto	6	84.206.355.059,00	8	0,00	5	0,00	3	0,00	-	0,00	-	0,00	5.707.289.917,00
3	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018	23	4.760.376.658,29	43	4.760.376.658,29	35	3.608.260.493,29	8	1.152.116.165,00	-	0,00	-	0,00	2.687.991.957,00



No	Objek Pemeriksaan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas daerah
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah		
						Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Jumlah</b>		<b>35</b>	<b>88.966.731.717,29</b>	<b>82</b>	<b>4.760.376.658,29</b>	<b>68</b>	<b>3.608.260.493,29</b>	<b>14</b>	<b>1.152.116.165,00</b>	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	<b>8.395.281.874,00</b>

TAHUN IHPS		:	2018											
1	Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Penanggulangan Bencana Daerah pada Tahap Prabencana Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (Semester I) pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Instansi Terkait Lainnya	17	0,00	49	0,00	47	0,00	2	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
2	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017	26	4.352.135.169,97	58	3.942.862.764,97	54	3.699.496.201,64	4	243.366.563,33	-	0,00	-	0,00	4.141.225.361,23
<b>Jumlah</b>		<b>43</b>	<b>4.352.135.169,97</b>	<b>107</b>	<b>3.942.862.764,97</b>	<b>101</b>	<b>3.699.496.201,64</b>	<b>6</b>	<b>243.366.563,33</b>	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	<b>4.141.225.361,23</b>

TAHUN IHPS		:	2017											
1	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016	18	2.397.949.613,20	32	2.397.949.613,20	30	2.397.949.613,20	2	0,00	-	0,00	-	0,00	2.398.043.025,69
2	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Manajemen Aset Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 dan Semester I 2017	14	0,00	39	0,00	35	0,00	4	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>32</b>	<b>2.397.949.613,20</b>	<b>71</b>	<b>2.397.949.613,20</b>	<b>65</b>	<b>2.397.949.613,20</b>	<b>6</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	<b>2.398.043.025,69</b>

No	Objek Pemeriksaan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas daerah
						Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah		
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>TAHUN IHPS</b>		:	<b>2016</b>											
1	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015	28	2.735.813.152,30	73	2.687.813.152,30	68	724.884.052,30	5	1.962.929.100,00	-	0,00	-	0,00	930.687.552,30
2	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan BUMD Tahun Anggaran 2011 sampai dengan 2016 pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Semarang	10	0,00	34	0,00	30	0,00	4	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
3	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2014 sampai dengan 2016 pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	11	0,00	44	0,00	44	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
4	Hasil Pemeriksaan BPK atas Kegiatan Operasional dan Investasi PT Sarana Patra Hulu Cepu Tahun Buku 2014 s.d. Semester I 2015	6	0,00	10	0,00	6	0,00	4	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>55</b>	<b>2.735.813.152,30</b>	<b>161</b>	<b>2.687.813.152,30</b>	<b>148</b>	<b>724.884.052,30</b>	<b>13</b>	<b>1.962.929.100,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>930.687.552,30</b>



No	Objek Pemeriksaan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas daerah
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah		
						Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>TAHUN IHPS</b>		:	<b>2015</b>											
1	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014	33	4.135.352.824,74	108	634.554.123,46	96	478.641.222,76	12	155.912.900,70	-	0,00	-	0,00	4.221.651.361,04
2	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Belanja Modal Infrastruktur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah TA 2015 di Semarang	5	1.984.580.167,03	17	1.984.580.167,03	17	1.984.580.167,03	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.984.587.659,65
3	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Tahun 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Semarang	6	0,00	14	0,00	12	0,00	2	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
4	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Program Penanggulangan Kemiskinan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010–2014 di Semarang	8	0,00	21	0,00	21	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>52</b>	<b>6.119.932.991,77</b>	<b>160</b>	<b>2.619.134.290,49</b>	<b>146</b>	<b>2.463.221.389,79</b>	<b>14</b>	<b>155.912.900,70</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.206.239.020,69</b>
<b>TAHUN IHPS</b>		:	<b>2014</b>											
1	LHP LKPD Provinsi Jawa Tengah TA 2013	21	1.042.532.185,53	62	1.042.532.185,53	60	1.042.532.185,53	2	0,00	-	0,00	-	0,00	1.042.532.185,53



No	Objek Pemeriksaan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas daerah
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah		
						Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Operasional pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2013 dan 2014 (s.d. Juli)	32	179.162.421.902,11	66	132.096.321.048,45	60	84.726.582.838,85	8	47.369.738.209,60	-	0,00	-	0,00	2.444.529.687,85
3	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Operasional RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Tahun Anggaran 2013 dan 2014 pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Banyumas	17	5.272.720.017,51	28	288.152.868,94	28	288.152.868,94	-	0,00	-	0,00	-	0,00	925.494.897,00
<b>Jumlah</b>		<b>70</b>	<b>185.477.674.105,15</b>	<b>156</b>	<b>133.427.006.102,92</b>	<b>146</b>	<b>86.057.267.893,32</b>	<b>10</b>	<b>47.369.738.209,60</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.412.556.770,38</b>

TAHUN IHPS		:	2013											
1	LHP BPK RI atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 pada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu/Panitia Pengawas Pemilu di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013	17	1.032.316.397,00	47	1.014.144.497,00	47	1.014.144.497,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.024.616.397,00
2	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas dan Jamkesda TA 2010 s.d. Semester I TA 2012 pada Provinsi Jawa Tengah dan RSUD Dr Moewardi	11	142.379.513,73	14	142.379.513,73	14	142.379.513,73	-	0,00	-	0,00	-	0,00	



No	Objek Pemeriksaan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas daerah
						Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah		
						Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012	13	524.818.000,00	29	524.818.000,00	29	524.818.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	603.298.006,75
4	LHP Kinerja atas Efektivitas Kegiatan Audit dan Reviu Laporan Keuangan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 dan Semester I 2013	25	0,00	52	0,00	52		-		-		-		
<b>Jumlah</b>		<b>66</b>	<b>1.699.513.910,73</b>	<b>142</b>	<b>1.681.342.010,73</b>	<b>142</b>	<b>1.681.342.010,73</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.627.914.403,75</b>

TAHUN IHPS		:	2012											
1	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2011 dan 2012	18	15.300.407.190,00	38	10.464.667.860,00	34	4.181.412.813,00	4	6.283.255.047,00	-	0,00	-	0,00	2.057.704.834,00
2	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011	18	2.335.147.801,00	40	1.987.891.611,00	36	1.987.891.611,00	4	0,00	-	0,00	-	0,00	2.119.472.611,00
3	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Operasional PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2011 dan 2012	8	0,00	13	0,00	12	0,00	1		-		-		3.505.309.640,00
<b>Jumlah</b>		<b>44</b>	<b>17.635.554.991,00</b>	<b>91</b>	<b>12.452.559.471,00</b>	<b>82</b>	<b>6.169.304.424,00</b>	<b>9</b>	<b>6.283.255.047,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.682.487.085,00</b>
TAHUN IHPS		:	2011											



No	Objek Pemeriksaan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas daerah
						Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah		
						Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010 di Semarang	12	666.521.328,00	26	666.521.328,00	26	666.521.328,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	666.521.328,00
2	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Belanja Daerah TA 2010 dan 2011 (s.d. Oktober) pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Di Semarang	12	867.431.057,99	29	867.431.057,99	29	867.431.057,99	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.095.122.353,38
3	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Kewajiban Perpajakan dalam Pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2010	9	128.875.889,00	55	128.875.889,00	55	128.875.889,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	128.875.889,00
4	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kinerja Pelayanan Farmasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr Moewardi Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010 dan Semester I 2011 di Surakarta	12	0,00	21	0,00	21		-		-		-		
<b>Jumlah</b>		<b>45</b>	<b>1.662.828.274,99</b>	<b>131</b>	<b>1.662.828.274,99</b>	<b>131</b>	<b>1.662.828.274,99</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890.519.570,38</b>

TAHUN IHPS		:	2010											
1	Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2009 dan 2010	14	488.547.225,00	27	462.877.225,00	26	462.877.225,00	1	0,00	-	0,00	-	0,00	461.947.225,00



No	Objek Pemeriksaan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas daerah
						Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah		
						Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) Tahun Buku 2009 dan 2010	11	6.928.588.309,00	23	6.444.088.309,00	23	1.186.838.323,00	-	5.257.249.986,00	-	0,00	-	0,00	894.253.632,00
3	Pemeriksaan LKPD Provinsi Jawa Tengah TA 2009	11	976.170.781,05	20	976.170.781,05	19	6.380.201,00	1	969.790.580,05	-	0,00	-	0,00	6.380.201,00
4	Hasil Pemeriksaan atas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan TA 2008 dan 2009 Provinsi Jawa Tengah	11	11.650.000,00	12	11.650.000,00	12	11.650.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	11.650.000,00
5	Hasil Pemeriksaan atas Pelaksanaan Belanja Bidang Infrastruktur Jalan dan Jembatan pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah	5	3.491.494.657,46	11	245.732.688,99	11	245.732.688,99	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.371.412.957,46
<b>Jumlah</b>		<b>52</b>	<b>11.896.450.972,51</b>	<b>93</b>	<b>8.140.519.004,04</b>	<b>90</b>	<b>1.913.478.437,99</b>	<b>2</b>	<b>6.227.040.566,05</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.745.644.015,46</b>
<b>TAHUN IHPS</b>		<b>:</b>	<b>2009</b>											
1	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah pada Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Tengah dan Instansi Terkait Lainnya di Semarang	7	947.934.146,22	13	947.934.146,22	5	112.722.419,00	8	835.211.727,22	-	0,00	-	0,00	165.320.515,00



No	Objek Pemeriksaan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas daerah
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah		
						Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk Tahun Anggaran 2008 di Semarang	17	212.311.104,98	35	212.311.104,98	32	62.083.288,00	3	150.227.816,98	-	0,00	-	0,00	160.340.039,00
<b>Jumlah</b>		<b>24</b>	<b>1.160.245.251,20</b>	<b>48</b>	<b>1.160.245.251,20</b>	<b>37</b>	<b>174.805.707,00</b>	<b>11</b>	<b>985.439.544,20</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>325.660.554,00</b>
<b>TAHUN IHPS</b>		<b>:</b>	<b>2008</b>											
1	Hasil Pemeriksaan atas Laporan Atas Kegiatan Operasional Bank Pembangunan Daerah Jateng Tahun Buku 2006 dan 2007	19	0,00	32	0,00	32	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2007	20	21.385.027.425,48	40	20.710.817.809,00	40	20.710.817.809,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	20.710.817.809,00
3	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Dana Pendidikan Dasar Lainnya (APBN dan APBD) TA 2007 dan 2008 (Semester I) pada Kanwil Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah	19	78.223.000,00	39	61.330.500,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	39	61.330.500,00	-
4	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Dan Dana Pendidikan Dasar Lainnya (APBN dan APBD) TA 2007 dan 2008 (Semester I) pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	13	1.382.344.934,00	25	1.382.344.934,00	25	1.382.344.934,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.382.344.934,00



No	Objek Pemeriksaan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas daerah
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah		
						Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Jumlah</b>		<b>71</b>	<b>22.845.595.359,48</b>	<b>136</b>	<b>22.154.493.243,00</b>	<b>97</b>	<b>22.093.162.743,00</b>	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	<b>39</b>	<b>61.330.500,00</b>	<b>22.093.162.743,00</b>

TAHUN IHPS		:	2007											
1	LHP atas LKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk Tahun Anggaran 2006	20	17.707.186,14	43	17.707.186,14	43	17.707.186,14	-	0,00	-	0,00	-	0,00	17.707.186,14
2	Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Dana Perimbangan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006 dan Smt I 2007	3	0,00	4	0,00	4		-		-		-		
<b>Jumlah</b>		<b>23</b>	<b>17.707.186,14</b>	<b>47</b>	<b>17.707.186,14</b>	<b>47</b>	<b>17.707.186,14</b>	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	<b>17.707.186,14</b>

TAHUN IHPS		:	2006											
1	Laporan Keuangan Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005 di Semarang	19	2.929.728.157,00	28	2.475.133.157,00	28	2.475.133.157,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2.936.147.157,00
2	Hasil Pemeriksaan atas (Audit Tujuan Tertentu) pada Perusahaan Daerah Propinsi Jawa Tengah dan PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah Tahun Buku 2005 dan 2006 di Semarang	13	1.328.890.115,78	20	1.328.890.115,78	20	1.328.890.115,78	-	0,00	-	0,00	-	0,00	964.390.115,78
<b>Jumlah</b>		<b>32</b>	<b>4.258.618.272,78</b>	<b>48</b>	<b>3.804.023.272,78</b>	<b>48</b>	<b>3.804.023.272,78</b>	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	<b>3.900.537.272,78</b>



No	Objek Pemeriksaan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas daerah	
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
						Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		Jml
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>TAHUN IHPS</b>		:	<b>2005</b>												
1	Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2004	6	87.006.179,00	7	87.006.179,00	7	87.006.179,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	87.006.179,00	
2	Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2004 dan 2005 pada Propinsi Jawa Tengah di Semarang	8	5.771.394.781,61	12	5.771.394.781,61	12	5.771.394.781,61	-	0,00	-	0,00	-	0,00	5.771.394.781,61	
3	Hasil Pemeriksaan atas PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun Buku 2004 dan 2005 di Semarang	16	26.359.993,92	25	26.359.993,92	25	26.359.993,92	-	0,00	-	0,00	-	0,00	26.359.993,92	
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>	<b>5.884.760.954,53</b>	<b>44</b>	<b>5.884.760.954,53</b>	<b>44</b>	<b>5.884.760.954,53</b>	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	<b>5.884.760.954,53</b>	

\* data per 4 Juli 2023

Semarang, 9 Agustus 2023

Inspektur  
Provinsi Jawa Tengah**DHONI WIDJANTO, S.Sos., M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19731015 199703 1 002

**B. Lampiran 2 Status Temuan Hasil Pemeriksaan/Audit dan Tindak Lanjutnya Hasil Pemeriksaan/Audit Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 s.d. 2023**

No	HP SEM	TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN			SELESAI DITINDAKLANJUTI			TEMUAN DALAM PROSES		
	Lingkup Pemeriksaan	JUMLAH			JUMLAH			JUMLAH		
	Kelompok Temuan	Temuan	Saran	Nilai (Rp)	Temuan	Saran	Nilai (Rp)	Temuan	Saran	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>A. REKAPITULASI HP/AUDIT TA 2023</b>										
1	Temuan Ketidapatuhan Terhadap Peraturan	122	160	886.422.651,84	57	57	160.694.573,00	65	103	725.728.078,84
2	Temuan kelemahan sistem pengendalian intern	155	180	0	29	33	0	126	147	
3	Temuan 3E	51	67	0	15	16	0	36	51	
	<b>TOTAL</b>	<b>328</b>	<b>407</b>	<b>886.422.651,84</b>	<b>101</b>	<b>106</b>	<b>160.694.573,00</b>	<b>227</b>	<b>301</b>	<b>725.728.078,84</b>
<b>B. REKAPITULASI HP/AUDIT TA 2022</b>										
1	Temuan Ketidapatuhan Terhadap Peraturan	483	725	35.989.337.481,62	387	580	35.190.487.280,14	96	145	798.850.201,48
2	Temuan kelemahan sistem pengendalian intern	772	969	0	480	603	0	292	356	0,00
3	Temuan 3E	157	222	0	137	197	0	20	25	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1.412</b>	<b>1.916</b>	<b>35.989.337.481,62</b>	<b>1004</b>	<b>1380</b>	<b>35.190.487.280,14</b>	<b>408</b>	<b>536</b>	<b>798.850.201,48</b>

No	HP SEM	TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN			SELESAI DITINDAKLANJUTI			TEMUAN DALAM PROSES		
	Lingkup Pemeriksaan	JUMLAH			JUMLAH			JUMLAH		
	Kelompok Temuan	Temuan	Saran	Nilai (Rp)	Temuan	Saran	Nilai (Rp)	Temuan	Saran	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>C. REKAPITULASI HP/AUDIT TA 2021</b>										
1	Temuan Ketidapatuhan Terhadap Peraturan	385	611	1.627.934.672,04	368	579	1.591.772.647,04	17	32	36.162.025,00
2	Temuan kelemahan sistem pengendalian intern	422	674	0	395	634	0	27	40	0,00
3	Temuan 3E	77	119	0	76	117	0	1	2	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>884</b>	<b>1.404</b>	<b>1.627.934.672,04</b>	<b>839</b>	<b>1.330</b>	<b>1.591.772.647,04</b>	<b>45</b>	<b>74</b>	<b>36.162.025,00</b>
<b>D. REKAPITULASI HP/AUDIT TA 2020</b>										
1	Temuan Ketidapatuhan Terhadap Peraturan	311	441	1.504.235.041,96	304	431	1.184.639.871,96	7	10	319.595.170,00
2	Temuan kelemahan sistem pengendalian intern	389	465	0	383	457	0	6	8	0,00
3	Temuan 3E	75	114	0	75	114	0	0	0	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>775</b>	<b>1.020</b>	<b>1.504.235.041,96</b>	<b>762</b>	<b>1.002</b>	<b>1.184.639.871,96</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>319.595.170,00</b>
<b>D. REKAPITULASI HP/AUDIT TA 2019</b>										
1	Temuan Ketidapatuhan Terhadap Peraturan	809	1.056	4.322.690.131,30	802	1.044	4.301.791.580,63	7	12	20.898.550,67



No	HP SEM	TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN			SELESAI DITINDAKLANJUTI			TEMUAN DALAM PROSES		
	Lingkup Pemeriksaan	JUMLAH			JUMLAH			JUMLAH		
	Kelompok Temuan	Temuan	Saran	Nilai (Rp)	Temuan	Saran	Nilai (Rp)	Temuan	Saran	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Temuan kelemahan sistem pengendalian intern	528	771	0	527	770	0	1	1	0,00
3	Temuan 3E	192	230	0	19	228	0	2	2	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1.529</b>	<b>2.057</b>	<b>4.322.690.131,30</b>	<b>1.519</b>	<b>2.042</b>	<b>4.301.791.580,63</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>20.898.550,67</b>
<b>E. REKAPITULASI HP/AUDIT TA 2018</b>										
1	Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan	865	1.368	2.049.627.784,04	855	1.368	1.901.409.147,40	10	16	148.218.636,64
2	Temuan kelemahan sistem pengendalian intern	552	708	0	550	706	0	2	2	0,00
3	Temuan 3E	224	295	0	224	295	0	0	0	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1.641</b>	<b>2.371</b>	<b>2.049.627.784,04</b>	<b>1.629</b>	<b>2.353</b>	<b>1.901.409.147,40</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>148.218.636,64</b>
<b>F. REKAPITULASI HP/AUDIT TA 2017</b>										
1	Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan	707	1.142	1.594.602.531,09	703	1.132	1.583.737.349,64	4	10	10.865.181,45
2	Temuan kelemahan sistem pengendalian intern	294	425	0	290	415	0	4	10	0,00
3	Temuan 3E	167	222	0	167	222	0	0	0	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1.168</b>	<b>1.789</b>	<b>1.594.602.531,09</b>	<b>1.160</b>	<b>1.769</b>	<b>1.583.737.349,64</b>	<b>8</b>	<b>20</b>	<b>10.865.181,45</b>

No	HP SEM	TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN			SELESAI DITINDAKLANJUTI			TEMUAN DALAM PROSES		
	Lingkup Pemeriksaan	JUMLAH			JUMLAH			JUMLAH		
	Kelompok Temuan	Temuan	Saran	Nilai (Rp)	Temuan	Saran	Nilai (Rp)	Temuan	Saran	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>G. REKAPITULASI HP/AUDIT TA 2016</b>										
1	Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan	1.241	1.720	13.641.333.386,06	1.224	1.697	13.503.122.369,55	17	23	138.211.016,51
2	Temuan kelemahan sistem pengendalian intern	564	718	6.495.000,00	555	705	6.495.000,00	9	13	0,00
3	Temuan 3E	310	424	0	306	418	0	4	6	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>2.115</b>	<b>2.862</b>	<b>13.647.828.386,06</b>	<b>2.085</b>	<b>2.820</b>	<b>13.509.617.369,55</b>	<b>30</b>	<b>42</b>	<b>138.211.016,51</b>
<b>H. REKAPITULASI HP/AUDIT TA 2015</b>										
1	Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan	1.212	1.768	5.913.404.678,10	1.202	1.753	4.476.587.060,71	10	15	1.436.817.617,39
2	Temuan kelemahan sistem pengendalian intern	677	847	0	676	847	0	0	0	0,00
3	Temuan 3E	371	485	0	371	485	0	0	0	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>2.260</b>	<b>3.100</b>	<b>5.913.404.678,10</b>	<b>2.248</b>	<b>3.080</b>	<b>4.476.587.060,71</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>1.436.817.617,39</b>
<b>H. REKAPITULASI HP/AUDIT TA 2014</b>										
1	Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan	930	1.373	3.316.675.110,62	919	1.345	3.012.797.841,03	20	55	303.877.269,59

No	HP SEM	TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN			SELESAI DITINDAKLANJUTI			TEMUAN DALAM PROSES		
	Lingkup Pemeriksaan	JUMLAH			JUMLAH			JUMLAH		
	Kelompok Temuan	Temuan	Saran	Nilai (Rp)	Temuan	Saran	Nilai (Rp)	Temuan	Saran	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Temuan kelemahan sistem pengendalian intern	475	608	0	474	607	0	1	1	0,00
3	Temuan 3E	413	542	0	413	542	0	0	0	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1.818</b>	<b>2.523</b>	<b>3.316.675.110,62</b>	<b>1.806</b>	<b>2.494</b>	<b>3.012.797.841,03</b>	<b>12</b>	<b>29</b>	<b>303.877.269,59</b>

\*data per 5 Juli 2023

Semarang, 9 Agustus 2023

Inspektur  
Provinsi Jawa Tengah



**DHONI WIDIANTO, S.Sos.,M.Si.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19731015 199703 1 002

**C. Lampiran 3 Status Temuan Hasil Pemeriksaan/Audit dan Tindak Lanjutnya Hasil Pemeriksaan/Audit Itjen Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011 s.d. 2022**

No	HP SEMESTERAN Kelompok/ Kode Temuan	TEMUAN HASIL PENGAWASAN			SELESAI DITINDAKLANJUTI			TEMUAN DALAM PROSES TL			TEMUAN BELUM DITINDAK LANJUTI			KET**
		Jml Temuan	Jml Saran	Nilai (Rp)	Jml Temuan	Jml Saran	Nilai (Rp)	Jml Temuan	Jml Saran	Nilai (Rp)	Jml Temuan	Jml Saran	Nilai (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	HP TAHUN 2022													
	Tidak Mencantumkan Kode temuan	9	14	0	8	13	0	1	1	0	0	0	0	
	Sub Jumlah A	9	14	0	8	13	0	1	1	0	0	0	0	
B	HP TAHUN 2021													
	Tidak Mencantumkan Kode temuan	2	4	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	
	Sub Jumlah A	2	4	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	
C	HP TAHUN 2020													
	Tidak Mencantumkan Kode temuan	3	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	
	Sub Jumlah B	3	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	
D	HP TAHUN 2019													
	Tidak Mencantumkan Kode temuan	13	25	0	13	25	0	0	0	0	0	0	0	
	Sub Jumlah C	13	25	0	13	25	0	0	0	0	0	0	0	
D	HP TAHUN 2018													
	Tidak													

No	HP SEMESTERAN	TEMUAN HASIL PENGAWASAN			SELESAI DITINDAKLANJUTI			TEMUAN DALAM PROSES TL			TEMUAN BELUM DITINDAK LANJUTI			KET**
		Kelompok/ Kode Temuan	Jml Temuan	Jml Saran	Nilai (Rp)	Jml Temuan	Jml Saran	Nilai (Rp)	Jml Temuan	Jml Saran	Nilai (Rp)	Jml Temuan	Jml Saran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Mencantumkan Kode temuan	16	34	0	16	34	0	0	0	0	0	0	0	
	Sub Jumlah D	16	34	0	16	34	0	0	0	0	0	0	0	
E	HP TAHUN 2017													
	Mencantumkan Kode temuan	20	29	0	20	29	0	0	0	0	0	0	0	
	Sub Jumlah E	20	29	0	20	29	0	0	0	0	0	0	0	
F	HP TAHUN 2016													
	Tidak mencantumkan kode temuan	15	20	0	15	20	0	0	0	0	0	0	0	
	Sub Jumlah F	15	20	0	15	20	0	0	0	0	0	0	0	
G	HP TAHUN 2015													
	Tidak mencantumkan kode temuan	20	28	0	20	28	0	0	0	0	0	0	0	
	Sub Jumlah G	20	28	0	20	28	0	0	0	0	0	0	0	
H	HP TAHUN 2014													
	Tidak mencantumkan kode temuan	21	31	0	21	31	0	0	0	0	0	0	0	
	Sub Jumlah H	21	31	0	21	31	0	0	0	0	0	0	0	
I	HP TAHUN 2013													

No	HP SEMESTERAN	TEMUAN HASIL PENGAWASAN			SELESAI DITINDAKLANJUTI			TEMUAN DALAM PROSES TL			TEMUAN BELUM DITINDAK LANJUTI			KET**
		Kelompok/ Kode Temuan	Jml Temuan	Jml Saran	Nilai (Rp)	Jml Temuan	Jml Saran	Nilai (Rp)	Jml Temuan	Jml Saran	Nilai (Rp)	Jml Temuan	Jml Saran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Tidak mencantumkan kode temuan	20	21	0	20	21	0	0	0	0	0	0	0	
	Sub Jumlah I	20	21	0	20	21	0	0	0	0	0	0	0	
J	HP Tahun 2012													
	Tidak mencantumkan kode temuan	35	44	172.236.000,00	35	44	172.236.000,00	0	0	0	0	0	0	
	Sub Jumlah J	35	44	172.236.000,00	35	44	172.236.000,00	0	0	0	0	0	0	
K	HP Tahun 2011													
	Tidak mencantumkan kode temuan	13	14	86.845.000,00	13	14	86.845.000,00	0	0	0	0	0	0	
	Sub Jumlah K	13	14	86.845.000,00	13	14	86.845.000,00	0	0	0	0	0	0	
	<b>Jumlah Total A-K</b>	<b>187</b>	<b>267</b>	<b>259.081.000,00</b>	<b>186</b>	<b>266</b>	<b>259.081.000,00</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

\*data per 6 Juli 2023

Semarang, 9 Agustus 2023

Inspektur  
Provinsi Jawa Tengah



**DHONI WIDJANTO, S.Sos., M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19731015 199703 1 002

#### D. Lampiran 4 Rekapitulasi Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat Semester I Tahun 2023

No	Tahun	Tanggal Input	Tanggal Diterima	No. Surat	Tanggal Surat	Sumber Aduan	Perihal	Klasifikasi Aduan	Penanganan	Hasil Tindak Lanjut	Action
1	2023	22-Jun-23	21-Jun-23	412.0/1737	20-Jun-23	SURAT ADUAN / LANGSUNG	pengaduan masyarakat	Tata Laksana/Regulasi	Diperiksa Inspektorat Provinsi	<b>BELUM DITINDAK LANJUTI</b>	
2	2023	20-Jun-23	25-May-23	-	25-May-23	SURAT ADUAN / LANGSUNG	pengaduan masyarakat	Pelayanan Masyarakat	Dilimpahkan ke Kab/Kota KABUPATEN KLATEN	PROSES	
3	2023	20-Jun-23	31-May-23	-	31-May-23	MEDIA SOSIAL	pengaduan masyarakat	Tata Laksana/Regulasi	Dilimpahkan ke Kab/Kota KABUPATEN PEMALANG	PROSES	
4	2023	20-Jun-23	19-Jun-23	-	19-Jun-23	SURAT ADUAN / LANGSUNG	pengaduan masyarakat	Penyalahgunaan Wewenang	Diperiksa Inspektorat Provinsi	<b>BELUM DITINDAK LANJUTI</b>	
5	2023	15-Jun-23	11-Apr-23	-	20-Mar-23	LIMPAHAN GUBERNUR	pengaduan masyarakat	Pertanahan/Perumahan	Diperiksa Inspektorat Provinsi	TDK_TERBUK TI	SELESAI
6	2023	31-May-23	29-May-23	-	2-May-23	SURAT ADUAN / LANGSUNG	pengaduan masyarakat	Penyalahgunaan Wewenang	Diperiksa Inspektorat Provinsi	<b>BELUM DITINDAK LANJUTI</b>	
7	2023	31-May-23	29-May-23	X.700.1.2.4/140/IJ	22-May-23	LIMPAHAN IRJEN	pengaduan masyarakat	Hukum/Peradilan/HAM	Diarsip	<b>BELUM DITINDAK LANJUTI</b>	
8	2023	19-May-23	15-May-23	B-04/D-2/Dumas/DM.05/05/2023	3-May-23	LIMPAHAN SETNEG	laporan kerusakan lingkungan di kawasan Pegunungan Kendeng	Lingkungan Hidup	Diarsip	<b>BELUM DITINDAK LANJUTI</b>	



No	Tahun	Tanggal Input	Tanggal Diterima	No. Surat	Tanggal Surat	Sumber Aduan	Perihal	Klasifikasi Aduan	Penanganan	Hasil Tindak Lanjut	Action
9	2023	16-May-23	12-May-23	-	25-Apr-23	LIMPAHAN GUBERNUR	pengaduan masyarakat	Pungli	Dilimpahkan ke Kab/Kota KABUPATEN DEMAK No. Surat: - Tgl. Surat: 2023-05-16	PROSES	
10	2023	17-Apr-23	21-Mar-23	-	21-Mar-23	MEDIA SOSIAL	pengaduan masyarakat	Korupsi	Dilimpahkan ke Kab/Kota KABUPATEN KEBUMEN	PROSES	
11	2023	13-Apr-23	7-Apr-23	-	7-Apr-23	SURAT ADUAN / LANGSUNG	pengaduan masyarakat	Kepegawaian Naker	Dilimpahkan ke Kab/Kota KABUPATEN TEGAL	PROSES	
12	2023	13-Apr-23	5-Apr-23	-	5-Apr-23	LAPORGUB	pengaduan masyarakat	Penyalahgunaan Wewenang	Dilimpahkan ke OPD OPD DINAS ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL	TDK_TERBUK TI	SELESAI
13	2023	12-Apr-23	10-Apr-23	-	10-Apr-23	MEDIA SOSIAL	pengaduan masyarakat	Kepegawaian Naker	Diperiksa Inspektorat Provinsi	PROSES	
14	2023	12-Apr-23	6-Apr-23	-	29-Mar-23	SURAT ADUAN / LANGSUNG	pengaduan masyarakat	Penyalahgunaan Wewenang	Diperiksa Inspektorat Provinsi	BELUM DITINDAK LANJUTI	
15	2023	13-Mar-23	22-Feb-23	-	21-Feb-23	SURAT ADUAN / LANGSUNG	pengaduan masyarakat	Tata Laksana/Regulasi	Diperiksa Inspektorat Provinsi	TDK_TERBUK TI	SELESAI
16	2023	10-Mar-23	10-Mar-23	-	16-Feb-23	LIMPAHAN GUBERNUR	pengaduan masyarakat	Penyalahgunaan Wewenang	Dilimpahkan ke Kab/Kota	PROSES	

No	Tahun	Tanggal Input	Tanggal Diterima	No. Surat	Tanggal Surat	Sumber Aduan	Perihal	Klasifikasi Aduan	Penanganan	Hasil Tindak Lanjut	Action
									KABUPATEN WONOSOBO No. Surat: - Tgl. Surat: 2023-03-10		
17	2023	10-Mar-23	2-Mar-23	-	31-Jan-23	LIMPAHAN GUBERNUR	pengaduan masyarakat	Penyalahgunaan Wewenang	Dilimpahkan ke Kab/Kota KABUPATEN WONOSOBO	PROSES	
18	2023	7-Mar-23	28-Feb-23	-	2-Jan-23	SURAT ADUAN / LANGSUNG	pengaduan masyarakat	Tata Laksana/Regulasi	Diperiksa Inspektorat Provinsi	PROSES	
19	2023	7-Feb-23	6-Feb-23	-	1-Feb-23	SURAT ADUAN / LANGSUNG	pengaduan masyarakat	Korupsi	Diperiksa Inspektorat Provinsi	PROSES	
20	2023	3-Feb-23	3-Feb-23	-	2-Feb-23	SURAT ADUAN / LANGSUNG	pengaduan masyarakat	Tata Laksana/Regulasi	Diperiksa Inspektorat Provinsi No. Surat: - Tgl. Surat: 2023-02-27	TDK_TERBUK TI	SELESAI
21	2023	1-Feb-23	1-Mar-23	-	23-Jan-23	LIMPAHAN GUBERNUR	pengaduan masyarakat	Korupsi	Diarsip	BELUM DITINDAK LANJUTI	
22	2023	1-Feb-23	1-Dec-23	X.700.1.2.4/007/IJ	12-Jan-23	LIMPAHAN IRJEN	aduan tentang Perbup Tegal No. 94 Tahun 2022	Tata Laksana/Regulasi	Diperiksa Inspektorat Provinsi	TDK_TERBUK TI	SELESAI
23	2023	26-Jan-23	24-Jan-23	-	17-Jan-23	SURAT ADUAN / LANGSUNG	pengaduan masyarakat	Korupsi	Diperiksa Inspektorat Provinsi	TERBUKTI	SELESAI



No	Tahun	Tanggal Input	Tanggal Diterima	No. Surat	Tanggal Surat	Sumber Aduan	Perihal	Klasifikasi Aduan	Penanganan	Hasil Tindak Lanjut	Action
24	2023	26-Jan-23	24-Jan-23	-	16-Jan-23	SURAT ADUAN / LANGSUNG	pengaduan masyarakat	Korupsi	Diperiksa Inspektorat Provinsi	TERBUKTI	SELESAI
25	2023	19-Jan-23	12-Jan-23	-	3-Jan-23	LIMPAHAN GUBERNUR	pengaduan masyarakat	Lingkungan Hidup	Diarsip	BELUM DITINDAK LANJUTI	
26	2023	13-Jan-23	11-Jan-23	-	11-Jan-23	SURAT ADUAN / LANGSUNG	pengaduan masyarakat	Korupsi	Diperiksa Inspektorat Provinsi	TERBUKTI	SELESAI

\*data per 7 Juli 2023

Semarang, 9 Agustus 2023

Inspektur  
Provinsi Jawa Tengah



**DHONI WIDIANTO, S.Sos., M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19731015 199703 1 002

